

MODERNISASI

PERADILAN

EDISI SPESIAL
LAPORAN TAHUNAN

JUNI 2022

Edisi
3

PERKARA YANG DITERIMA MA
PERIODE JANUARI-APRIL 2022
MENINGKAT 41,59%

PERKARA YANG DIPUTUS MA
PERIODE JANUARI-APRIL 2022
MENINGKAT 32,71%

KINERJA MINUTASI PERKARA MA
PERIODE JANUARI-APRIL 2022
MENINGKAT 27,89%

“ Keganiteraan MA
Gelar Simulasi TTE
Salinan Penetapan Penahanan
dan Petikan Putusan serta
Aplikasi Direktori Putusan
Versi Mobile



LAPORAN TAHUNAN
MA 2021
DALAM PEMBERITAAN
MEDIA MASA





**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Zona Integritas Kepaniteraan

TIM REDAKSI

Penanggung Jawab

Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H

Dr. Iyus Suryana, S.H., M.H

Pemimpin Redaksi

Asep Nursobah, S.A.g., M.H

Anggota Redaksi

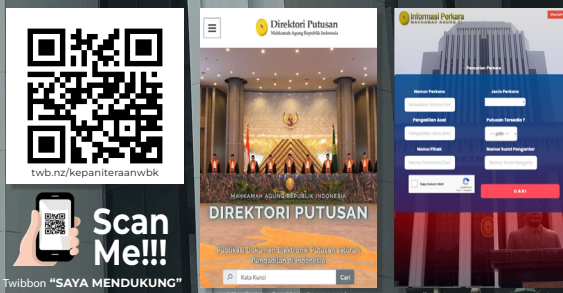
Angel Firstia Kresna, Ahmad Z. Anam,
Wardhani, Arief Fadhilah, Musta'in, Ricko
Rikardo, Wahyu Arba, Avisena, Apriyodi,
Amie Maya, M. Rijaldy Alwy

Editor Naskah

Margi Purwandani

Layout/ Tata Letak

Margi Purwandani



<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>



kepaniteraan.mari@gmail.com



[kepaniteraan_ma_info](https://www.instagram.com/kepaniteraan_ma_info)

PENGANTAR PANITERA

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.

Bismillahirrahmanirrahim. Rasa syukur tiada terhingga kami panjatkan ke hadirat Allah Swt atas hadirnya kembali “Modernisasi Peradilan”, sebuah majalah edisi istimewa Kepaniteraan Mahkamah Agung yang diterbitkan istimewa pada momentum khusus. “Modernisasi Peradilan” yang ada di tangan pembaca ini adalah edisi ketiga yang terbit pada bulan Juni 2022. Edisi ke tiga hadir untuk mengabadikan momen khusus Laporan Tahunan 2022 dan potret kinerja penanganan pertama Mahkamah Agung periode catur wulan pertama tahun 2022. Edisi pertama majalah ini diterbitkan pada momen khusus purnabhakti Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H, pada Mei 2020. Sedangkan edisi kedua diterbitkan pada momen khusus purnabhakti Panitera MA, Made Rawa Aryawan, S.H., M.H., pada bulan Februari 2022.

Momentum Istimewa di 22-02-2022

Mahkamah Agung telah menyelenggarakan Sidang Istimewa Laporan Tahunan 2021, Selasa 22 Februari 2022. Dalam perhelatan akbar tahunan tersebut, Ketua MA, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H. M.H., menyampaikan pidato di hadapan anggota sidang yang sifatnya terbuka untuk umum mengenai capaian kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya sepanjang tahun 2021. Sebagaimana penyelenggaraan Laporan Tahunan MA tahun sebelumnya, Presiden RI hadir di acara tersebut dan menyampaikan sambutannya. Presiden hadir secara virtual bersama dengan Wakil Presiden RI serta sejumlah anggota kabinet Indonesia Maju.

Dalam pidatonya, Ketua MA menyampaikan semua parameter pengukuran kinerja

penanganan perkara pada Mahkamah Agung tahun 2021 telah berhasil melampaui semua target yang ditetapkan. Bahkan, sebagian besar capaian tersebut berhasil mencatatkan semua rekor sebagai capaian terbaik sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung. Ketua MA juga menyampaikan sejumlah capaian dan peristiwa penting di bidang non teknis penanganan perkara (bidang kesekretariatan). Berbagai capaian tersebut diapresiasi oleh Presiden RI dalam pidatonya. Presiden pun menaruh harapan yang tinggi akan peran serta Mahkamah Agung dalam transformasi hukum di Indonesia.

Sebagai sebuah peristiwa nasional, materi pidato Ketua MA dan pidato Presiden RI dalam sidang istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2021 menjadi perhatian semua pihak, termasuk menjadi objek pemberitaan media masa nasional. Tim Redaksi Kepaniteraan Mahkamah Agung telah melakukan penelusuran kepada sejumlah media online nasional yaitu Antaranews.co.id, Detik.com, Republika.co.id, Hukum Online, Liputan6.com, Tirto.id, Tempo.co, Tribunnews.com, Merdeka.com, dan Viva.co.id. Tim meneliti bagaimana sudut pandang media melihat laporan tahunan MA dari sisi pilihan judul berita. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap media tersebut, terdapat 30 judul berita yang bersumber dari pidato Ketua Mahkamah Agung dan Pidato Presiden RI dengan rincian sebagai berikut:

No	MediaOnline	Jumlah Artikel Berita
1.	Antaraneews.com	8
2.	Detik.com	5
3.	Tempo.co	3
4.	Hukum Online	2
5.	Liputan6.com	2
6.	Republika.co.id	2
7.	Tirto.id	2
8.	Cnnindonesia.com	1
9.	Media Indonesia.com	1
10.	Merdeka.com	1
11.	RRI.CO.ID	1
12.	Tribunnews.com	1
13.	Viva.co.id	1
Jumlah		30



Antaraneews.com

Presiden apresiasi MA percepat transformasi hukum di Indonesia
<https://www.antaraneews.com/berita/2718489/presiden-apresiasi-ma-percepat->



Detik.com

Mahkamah Agung Setor Rp 74 T ke Negara Sepanjang 2021
<https://20.detik.com/detikflash/220222080-20220222/mahkamah-agung-setor->



Hukum Online

MA 'cetak' Rekor Terendah Sisa Perkara Sepanjang Sejarah
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-cetak-rekor-terendah-sisa-perkara-sepanjang-sejarah-lt62149fbfe6af6?r=0&p=1&q=>



Republika.co.id

Jokowi Apresiasi MA Ciptakan Peradilan Modern
<https://www.republika.co.id/berita/r7pw4b467/jokowi-apresiasi-ma-ciptakan->

” Untuk mengabadikan sudut pandang media yang tersebar di berbagai laman media masa, Kepaniteraan Mahkamah Agung berinisiatif memuat ulang dalam format majalah yang mudah dibaca. Kami juga menyediakan pintasan berupa *quick respons code* (QR-Code) yang memudahkan pembaca untuk mengakses informasi tersebut di sumber aslinya. ”

Tancap Gas Sejak Awal Tahun

Kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung tahun 2021 yang mendapat apresiasi publik tersebut ternyata dapat dipertahankan pada awal tahun berikutnya. Merujuk pada angka statistik penanganan perkara, Majelis Hakim Agung konsisten menjaga ritme kerja dari awal hingga akhir tahun. Mereka sudah tancap gas sejak awal tahun.

Selama periode Januari sampai dengan April 2022, Mahkamah Agung telah mendaftarkan sebanyak 11.605 perkara. Jumlah ini meningkat 41,59% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang hanya mendaftarkan sebanyak 8.196 perkara. Beban penanganan perkara yakni kumulasi sisa perkara tahun sebelumnya dengan jumlah perkara yang didaftarkan pada tahun berjalan, juga mengalami peningkatan. Jumlah beban perkara pada catur wulan pertama di tahun 2022 ini sebanyak 11.780 perkara. Jumlah ini merupakan gabungan dari sisa perkara tahun 2021 berjumlah 175 perkara dan perkara yang didaftarkan sebanyak 11.608 perkara. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022, jumlah beban perkara catur wulan pertama tahun 2022 meningkat 40,32%.

Jumlah perkara yang diputus Mahkamah Agung pada periode Januari --April 2022 juga mengalami peningkatan signifikan. Secara year on year, peningkatan jumlah perkara yang diputus mencapai 32,71 %. Sebanyak 7.193 perkara telah diputus selama periode Januari--April 2022, sedangkan pada periode yang sama pada tahun 2021 jumlah perkara yang diputus sebanyak 5420 perkara.

Torehan prestasi di awal tahun ini juga menjalar kepada kinerja minutasi perkara. Selama periode Januari—April 2022, Kepaniteraan Mahkamah Agung mengirimkan berkas perkara/salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 8.740 perkara. Jumlah tersebut meningkat 27,89% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang mengirim sebanyak 6.834 berkas perkara.

Kinerja minutasi bukan hanya dari sisi jumlah berkas yang dikirim namun juga waktu penyelesaian. Mengutip data pada SIAP-MA, dari 8.740 berkas perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju pada catur wulan pertama tahun 2022, sebanyak 3.359 (38,43%) diselesaikan dalam waktu kurang dari 120 hari kalender terhitung mulai perkara diterima oleh majelis sampai dikirim ke pengadilan pengaju. Sementara itu terkait dengan pengikisan jumlah tunggakan minutasi perkara, pada akhir tahun 2021, MA memiliki tunggakan minutasi sebanyak 9.363 perkara. Jumlah tunggakan tersebut telah terkikis 64,24% pada akhir April 2024 sehingga tersisa 3.348 perkara.

Kepaniteraan Mahkamah Agung berkomitmen untuk selalu meningkatkan kinerja penanganan perkara melalui berbagai langkah pembaruan manajemen perkara berbasis teknologi informasi. Pada saat yang bersamaan, Kepaniteraan Mahkamah Agung juga berkomitmen mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dua topik tersebut menjadi menu sajian utama dalam majalah edisi istimewa ini. Kami berharap informasi yang disuguhkan majalah edisi istimewa ini dapat memberikan manfaat disertai permohonan maaf karena kami menyadari terbitan ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan.

Panitera Mahkamah Agung



Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H

Berikut judul berita yang ditulis media masa online nasional dari peristiwa
 “Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2021”

No.	Nama Media	Judul Berita	Tautan Artikel
1.	Antaraneews.com	Info Grafis Penanganan Perkara	https://www.antaraneews.com/infografik/2723357/kinerja-mahkamah-agung2021-
2.	Antaraneews.com	Bamsoet: Mahkamah Agung berhasil terapkan peradilan elektronik	https://www.antaraneews.com/berita/2719913/bamsoet-mahkamah-agung-berhasil-terapkan-peradilan-elektronik
3.	Antaraneews.com	Jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan putusan MA capai Rp21,9 T	https://www.antaraneews.com/berita/2718585/jumlah-denda-dan-uang-pengganti-berdasarkan-putusan-ma-capai-rp-219t
4.	Antaraneews.com	Presiden apresiasi MA percepat transformasi hukum di Indonesia	https://www.antaraneews.com/berita/2718489/presiden-apresiasi-ma-percepat-transformasi-hukum-di-indonesia
5.	Antaraneews.com	MA selesaikan 129.575 perkara pidana secara elektronik pada 2021	https://www.antaraneews.com/berita/2718465/ma-selesaikan-129575-perkara-pidana-secara-elektronik-pada2021-
6.	Antaraneews.com	Presiden harap MA bantu kurangi hambatan hukum pembangunan ekonomi	https://www.antaraneews.com/berita/2718361/presiden-harap-ma-bantu-kurangi-hambatan-hukum-pembangunan-ekonomi
7.	Antaraneews.com	Rasio produktivitas memutus MA tahun 2021 capai 99,10 persen	https://www.antaraneews.com/berita/2718349/rasio-produktivitas-memutus-ma-tahun-2021-capai-9910-persen
8.	Antaraneews.com	Presiden: Pemerintah butuh dukungan MA untuk transformasi Indonesia	https://www.antaraneews.com/berita/2718333/presiden-pemerintah-butuh-dukungan-ma-untuk-transformasi-indonesia
9.	Detik.com	Jokowi Hadiri Sidang Laporan Tahunan MA Secara Virtual	https://news.detik.com/berita/d5953012-/jokowi-hadiri-sidang-laporan-tahunan-ma-secara-virtual
10.	Detik.com	Mahkamah Agung Setor Rp 74 T ke Negara Sepanjang 2021	https://20.detik.com/detikflash/220222080-20220222/mahkamah-agung-setor-rp-74-t-ke-negara-sepanjang2021-
11.	Detik.com	Rekor! MA Klaim Putus 19.233 Perkara Sepanjang 2021	https://20.detik.com/detikflash/220222077-20220222/rekor-ma-klaim-putus-19233-perkara-sepanjang2021-
12.	Detik.com	Sepanjang 2021 MA Sanksi 250 Hakim, 3 di Antaranya Disanksi Berat	https://20.detik.com/detikflash/220222084-20220222/sepanjang-2021-ma-sanksi-250-hakim-3-di-antaranya-disanksi-berat
13.	Detik.com	Hadiri Sidang Tahunan MA, Jokowi Singgung Mafia Hukum	https://20.detik.com/detikflash/220222073-20220222/hadiri-sidang-tahunan-ma-jokowi-singgung-mafia-hukum
14.	Hukum Online	MA 'Cetak' Rekor Terendah Sisa Perkara Sepanjang Sejarah	https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-cetak-rekor-terendah-sisa-perkara-sepanjang-sejarah-lt62149fbfe6af6?r=0&p=1&q=laporan20%tahunan20%mahkamah20%agung&rs=2000&re=2022
15.	Hukum Online	Ketua MA: Tahun 2021, Akselerasi Perwujudan Peradilan Modern	https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-ma--tahun--2021-akselerasi-perwujudan-peradilan-modern-lt621490f72ee13?r=1&p=1&q=laporan20%tahunan20%mahkamah20%agung&rs=2000&re=2022

No.	Nama Media	Judul Berita	Tautan Artikel
16.	Liputan6.com	Mahkamah Agung: Pandemi Covid19- Percepat Sistem Peradilan Konvensional ke Elektronik	https://www.liputan6.com/news/read/4893740/mahkamah-agung-pandemi-covid-19-percepat-sistem-peradilan-konvensional-ke-elektronik?source=search
17.	Liputan6.com	Mahkamah Agung Putus 19.233 Perkara Sepanjang 2021	https://www.liputan6.com/news/read/4893743/mahkamah-agung-putus-19233-perkara-sepanjang-2021?source=search
18.	Merdeka.com	Jokowi Minta MA Utamakan Restorative Justice dalam Perkara Pidana	https://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-minta-ma-utamakan-restorative-justice-dalam-perkara-pidana.html
19.	Media Indonesia.com	Presiden: MA Pegang Peran Krusial dalam Mengawal Transformasi Indonesia	https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/473178/presiden-ma-pegang-peran-krusial-dalam-mengawal-transformasi-indonesia
20.	Republika.co.id	Jokowi Apresiasi MA Ciptakan Peradilan Modern	https://www.republika.co.id/berita/r7pw4b467/jokowi-apresiasi-ma-ciptakan-peradilan-modern
21.	Republika.co.id	Transformasi di Mahkamah Agung Diapresiasi	https://republika.co.id/berita/r7qbaa5125000/transformasi-di-mahkamah-agung-diapresiasi
22.	RRI.CO.ID	Ketua MA Sampaikan Laporan Tahunan 2021	https://rri.co.id/nasional/hukum/1365574/ketua-ma-sampaikan-laporan-tahunan-2021
23.	Tempo.co	Mahkamah Agung Berhasil Lampau Target pada 2021	https://foto.tempo.co/read/95390/mahkamah-agung-berhasil-lampau-target-pada-2021
24.	Tempo.co	Jokowi Dorong MA Utamakan Mediasi dan Restorative Justice Selesaikan Perkara	https://nasional.tempo.co/read/1563469/jokowi-dorong-ma-utamakan-mediasi-dan-restorative-justice-selesaikan-perkara
25.	Tempo.co	Jokowi Sebut Pemerintah Butuh Dukungan MA Jalankan Agenda Reformasi	https://nasional.tempo.co/read/1563437/jokowi-sebut-pemerintah-butuh-dukungan-ma-jalankan-agenda-reformasi
26.	Tirto.id	Ketua MA Pamer Rekor Penyelesaian Perkara di Depan Jokowi	https://tirto.id/ketua-ma-pamer-rekor-penyelesaian-perkara-di-depan-jokowi-gpjZ
27.	Tirto.id	Jokowi Dorong MA Perkuat Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan	https://tirto.id/jokowi-dorong-ma-perkuat-akses-keadilan-bagi-kelompok-rentan-gpjG
28.	Tribunnews.com	Presiden Jokowi Dorong MA Terapkan Model Alternatif Penyelesaian Perkara	https://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/22/presiden-jokowi-dorong-ma-terapkan-model-alternatif-penyelesaian-perkara
29.	Viva.co.id	Mahkamah Agung Putus 19.233 Perkara Selama 2021	https://www.viva.co.id/berita/nasional/1451590-mahkamah-agung-putus-19-233-perkara-selama-2021?terbaru=1
30.	Cnnindonesia.com	Jokowi: Pemerintah Transformasi Hukum Demi Berantas Korupsi	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220222105716-12-762304/jokowi-pemerintah-transformasi-hukum-demi-berantas-korupsi

DAFTAR ISI

- iii. KATA PENGANTAR PANITERA MAHKAMAH AGUNG

- 11. PRESIDEN RI: “SEMANGAT TRANSFORMASI DI TUBUH MAHKAMAH AGUNG SELARAS DENGAN SEMANGAT TRANSFORMASI INDONESIA”

- 15. Infografik kinerja mahkamah agung 2021

- 16. Bamsoet : mahkamah agung berhasil terapkan peradilan elektronik

- 18. Jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan putusan MA capai Rp21,9 T

- 20. Presiden apresiasi MA percepat transformasi hukum di Indonesia

- 22. MA selesaikan 129.575 perkara pidana secara elektronik pada 2021

- 24. Presiden harap MA bantu kurangi hambatan hukum pembangunan ekonomi

- 26. Rasio produktivitas memutus MA tahun 2021 capai 99,10 persen

- 27. Presiden: Pemerintah butuh dukungan MA untuk transformasi Indonesia

- 28. Jokowi Hadiri Sidang Laporan Tahunan MA Secara Virtual

- 29. Mahkamah Agung Setor Rp 74 T ke Negara Sepanjang 2021

- 30. Rekor! MA Klaim Putus 19.233 Perkara Sepanjang 2021

- 31. Sepanjang 2021 MA Sanksi 250 Hakim, 3 di Antaranya Disanksi Berat

- 32. Hadiri Sidang Tahunan MA, Jokowi Singgung Mafia Hukum

- 33. MA ‘Cetak’ Rekor Terendah Sisa Perkara Sepanjang Sejarah

- 36. Ketua MA: Tahun 2021, Akselarasi Perwujudan Peradilan Modern

- 38. Mahkamah Agung: Pandemi Covid-19 Percepat Sistem Peradilan Konvensional ke Elektronik

DAFTAR ISI

40. Mahkamah Agung Putus 19.233 Perkara Sepanjang 2021

42. Jokowi Minta MA Utamakan Restorative Justice dalam Perkara Pidana

43. Presiden: MA Pegang Peran Krusial dalam Mengawal Transformasi Indonesia

44. Jokowi Apresiasi MA Ciptakan Peradilan Modern

45. Transformasi di Mahkamah Agung Diapresiasi

46. Ketua MA Sampaikan Laporan Tahunan 2021

48. Mahkamah Agung Berhasil Lampau Target pada 2021

49. Jokowi Dorong MA Utamakan Mediasi dan Restorative Justice Selesaikan Perkara

50. Jokowi Sebut Pemerintah Butuh Dukungan MA Jalankan Agenda Reformasi

51. Ketua MA Pamer Rekor Penyelesaian Perkara di Depan Jokowi

52. Jokowi Dorong MA Perkuat Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan

54. Presiden Jokowi Dorong MA Terapkan Model Alternatif Penyelesaian Perkara

55. Mahkamah Agung Putus 19.233 Perkara Selama 2021

56. Jokowi: Pemerintah Transformasi Hukum Demi Berantas Korupsi

58. Kepaniteraan MA Gelar Simulasi TTE Salinan Penetapan Penahanan dan Petikan Putusan serta Aplikasi Direktori Putusan Versi Mobile

60. Perkara yang Diterima MA Periode Januari-April 2022 Meningkat 41,59%.

62. Jumlah Perkara yang Diputus MA Periode Januari-April 2022 Meningkat 32,71%

63. Panitera MA : Kinerja Minutasi Perkara MA Periode Januari—April 2022 Meningkat 27,89%.



PRESIDEN RI: “SEMANGAT TRANSFORMASI DI TUBUH MAHKAMAH AGUNG SELARAS DENGAN SEMANGAT TRANSFORMASI INDONESIA”

JAKARTA | (22/2/2022)

Pemerintah sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Agung yang telah bekerja keras mengakselerasi pembangunan pengadilan modern, mentransformasi dari sistem peradilan konvensional ke sistem peradilan yang lebih modern untuk mempercepat transformasi hukum di Indonesia. Transformasi ini menjadi tahapan penting dalam memberikan pelayanan peradilan yang lebih baik, bagi masyarakat pencari keadilan. Pelayanan peradilan yang lebih cepat dan lebih mudah, yang sederhana, berbiaya ringan dan profesional, serta memastikan terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan. Semangat transformasi di tubuh Mahkamah Agung ini, selaras dengan semangat transformasi Indonesia yang dilakukan pemerintah.



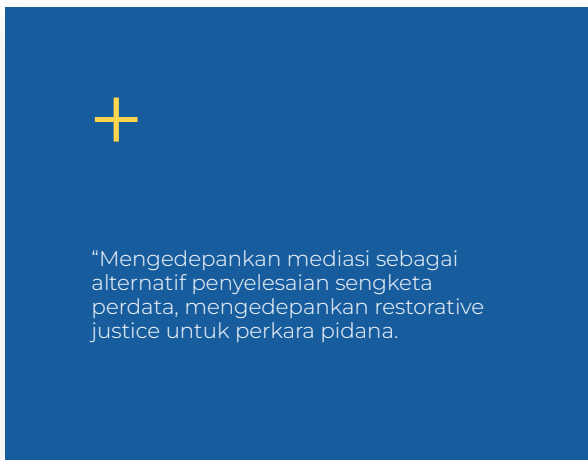
Demikian disampaikan Presiden RI, Joko Widodo, dalam sambutannya pada Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2021 secara virtual dari Istana Negara, Selasa (22/2/22). Hadir puladalam acara tersebut Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin.

Presiden RI mengatakan bahwa pemerintah sedang mengawal beberapa transformasi penting; meningkatkan pemerataan agar pembangunan lebih Indonesia-sentris, memperluas hilirisasi agar nilai tambah sumber daya alam Indonesia lebih banyak dinikmati oleh rakyat kita, mendukung UMKM naik kelas antara lain melalui digitalisasi, memperkuat ekonomi hijau yang lebih menyejahterakan dan menyejahterakan rakyat, mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan, dan memperkuat ekonomi biru agar kekayaan maritim kita bisa lestari dan menyejahterakan

Menurut Presiden, Transformasi juga dilakukan di bidang hukum melalui reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha, menarik sebanyak mungkin dan menjamin keamanan investasi, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan daya saing bangsa, serta memberantas tindak pidana korupsi.

Presiden menegaskan bahwa semua agenda transformasi tersebut tidak mungkin bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah, oleh eksekutif saja. Pemerintah butuh dukungan penuh dari seluruh komponen bangsa, pemerintah butuh dukungan penuh dari lembaga legislatif dan lembaga yudikatif.

“Pemerintah butuh dukungan dari Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan tinggi, pengadilan negeri di seluruh tanah air Indonesia”, tegas Presiden RI.



MA Pengawal Keadilan

Dikatakan Presiden bahwa peran Mahkamah Agung sebagai pengawal keadilan sangat krusial dalam mendukung transformasi Indonesia dengan menghasilkan landmark decision yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pelaku usaha dan investor, yang melindungi aset-aset negara dan aset-aset publik lainnya, serta memberikan efek jera bagi koruptor dan mafia-mafia hukum yang mencederai rasa keadilan.

Selain itu, lanjut Presiden, model-model alternatif penyelesaian perkara perlu diterapkan untuk mengurangi beban pengadilan. Mengedepankan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata, mengedepankan restorative justice untuk perkara pidana serta proses dialog yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait secara profesional, transparan dan akuntabel, agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud.

“Kami berharap Mahkamah Agung terus melakukan upaya-upaya strategis dalam mengurangi hambatan-hambatan hukum untuk percepatan pembangunan ekonomi, antara lain melalui percepatan penanganan perkara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana, mendorong konsistensi putusan, serta melakukan reformasi pelaksanaan putusan” ujar Presiden.

Akses terhadap Keadilan

Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa Pemerintah berharap agar Mahkamah Agung tetap konsisten dalam memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, dan penyandang disabilitas melalui penguatan peraturan layanan dan akses disabilitas di setiap lini pengadilan.

“Kami meyakini upaya penegakan hukum yang efektif oleh Mahkamah Agung akan berkontribusi mewujudkan kesejahteraan dan kestabilan sosial, memperkuat sistem demokrasi, dan mempercepat transformasi menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan”, pungkas Presiden. [an]



Berikut Transkrip Pidato Lengkap Presiden yang disampaikan pada Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2021 yang dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI <https://setkab.go.id/sidang-istimewa-laporan-tahunan-mahkamah-agung-tahun-2021-secara-virtual-dari-istana-negara-provinsi-dki-jakarta-22-februari-2022/>

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia;
Yang saya hormati Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, para wakil ketua, dan seluruh jajaran hakim agung;
Yang saya hormati pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara;
Yang saya hormati Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Negara-negara sahabat;
Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar Negara-negara sahabat;
Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia.

Pemerintah sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Agung yang telah bekerja keras mengakselerasi pembangunan pengadilan modern, mentransformasi dari sistem peradilan konvensional ke sistem peradilan yang lebih modern untuk mempercepat transformasi hukum di Indonesia.

Transformasi ini menjadi tahapan penting dalam memberikan pelayanan peradilan yang lebih baik, bagi masyarakat pencari keadilan. Pelayanan peradilan yang lebih cepat dan lebih mudah, yang sederhana, berbiaya ringan dan profesional, serta memastikan terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan.

Yang Mulia para Hakim Agung dan hadirin yang saya hormati,
Semangat transformasi di tubuh Mahkamah Agung ini, selaras dengan semangat transformasi Indonesia yang dilakukan pemerintah. Pemerintah sedang mengawal beberapa transformasi penting; meningkatkan pemerataan agar pembangunan lebih Indonesia-sentris, memperluas hilirisasi agar nilai tambah sumber daya alam Indonesia lebih banyak dinikmati oleh rakyat kita, mendukung UMKM naik kelas antara lain melalui digitalisasi, memperkuat ekonomi hijau yang lebih sehat dan menyejahterakan rakyat, mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan, dan memperkuat ekonomi biru agar kekayaan maritim kita bisa lestari dan menyejahterakan rakyat.

Transformasi juga kita lakukan di bidang hukum melalui reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha, menarik sebanyak mungkin dan menjamin keamanan investasi, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan daya saing bangsa, serta memberantas tindak pidana korupsi.

Yang Mulia para Hakim Agung dan hadirin yang saya hormati,
Semua agenda transformasi tersebut tidak mungkin bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah, oleh eksekutif saja. Pemerintah butuh dukungan penuh dari seluruh komponen bangsa, pemerintah butuh dukungan penuh dari lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, pemerintah butuh dukungan dari Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan tinggi, pengadilan negeri di seluruh tanah air Indonesia.

Peran Mahkamah Agung sebagai pengawal keadilan sangat krusial dalam mendukung transformasi Indonesia dengan menghasilkan landmark decision yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pelaku usaha dan investor, yang melindungi aset-aset negara dan aset-aset publik lainnya, serta memberikan efek jera bagi koruptor dan mafia-mafia hukum yang mencederai rasa keadilan.

Selain itu, model-model alternatif penyelesaian perkara perlu diterapkan untuk mengurangi beban pengadilan. Mengedepankan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata, mengedepankan restorative justice untuk perkara pidana serta proses dialog yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait secara profesional, transparan dan akuntabel, agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud.

Kami berharap Mahkamah Agung terus melakukan upaya-upaya strategis dalam mengurangi hambatan-hambatan hukum untuk percepatan pembangunan ekonomi, antara lain melalui percepatan penanganan perkara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana, mendorong konsistensi putusan, serta melakukan reformasi pelaksanaan putusan.

Kami juga berharap agar Mahkamah Agung tetap konsisten dalam memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, dan penyandang disabilitas melalui penguatan peraturan layanan dan akses disabilitas di setiap lini pengadilan.

Kami meyakini upaya penegakan hukum yang efektif oleh Mahkamah Agung akan berkontribusi mewujudkan kesejahteraan dan kestabilan sosial, memperkuat sistem demokrasi, dan mempercepat transformasi menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan.

Saya rasa itu yang penting, yang ingin saya sampaikan.
Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



LAPORAN TAHUNAN MA 2021 DALAM PEMBERITAAN MEDIA MASA

(sudut pandang publik terhadap kinerja
penanganan perkara)



Kinerja Mahkamah Agung 2021

Produktivitas Mahkamah Agung (MA) dalam menyelesaikan perkara mengalami peningkatan pada tahun 2021. Ini terlihat dalam Laporan Tahunan yang disampaikan MA.



KINERJA MAHKAMAH AGUNG 2021

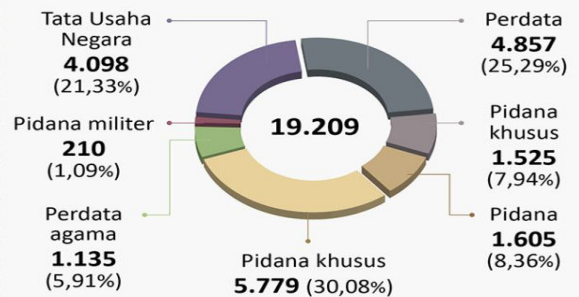
Produktivitas Mahkamah Agung (MA) dalam menyelesaikan perkara mengalami peningkatan pada tahun 2021. Ini terlihat dalam Laporan Tahunan yang disampaikan MA, Selasa (22/2) lalu.



BEBAN PERKARA



JENIS PERKARA



RASIO PRODUKTIVITAS



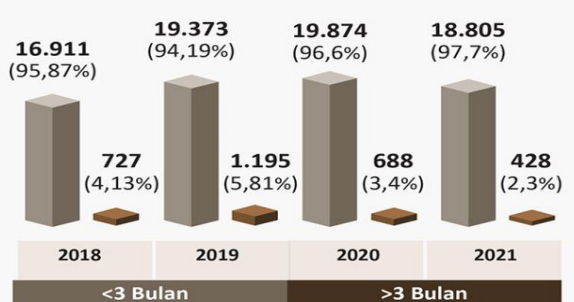
SISA PERKARA



“Penanganan perkara pada Mahkamah Agung tahun 2021 melampaui target yang ditetapkan dan sebagian besar mencatatkan rekor sebagai capaian terbaik sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung.”

M. Syarifuddin
Ketua Mahkamah Agung

DURASI PEMUTUSAN PERKARA



Bamsoet :

Mahkamah Agung berhasil terapkan peradilan elektronik



Dari jumlah itu, 11.817 perkara sudah disidangkan melalui e-Litigation. Sementara pada tingkat banding, jumlah perkara melalui e-Court tercatat mencapai 1.876 perkara, sebanyak 1.712 perkara di antaranya telah mendapatkan putusan.

Pengguna e-Court sampai Desember 2021 mencapai 208.851 pengguna. Jumlah itu terdiri dari 48.002 kalangan advokat, dan 160.849 dari perorangan, pemerintah, badan hukum, dan kuasa insidentil. MA juga melaporkan 129.575 perkara pidana di luar pidana lalu lintas telah diselesaikan melalui sistem persidangan elektronik.

“Ini menunjukkan sistem peradilan elektronik berjalan efektif di semua jenis perkara yang berada di empat lingkungan peradilan di bawah MA,” kata Ketua DPR RI Ke-20 tersebut.

Dari laporan yang disampaikan Ketua MA Muhammad Syarifuddin, seluruh target kerja lembaga peradilan di 2021 sudah terlampaui.

Hal itu juga mencatatkan rekor capaian terbaik sepanjang berdirinya MA.

“Rekor tersebut antara lain terlihat dari tingginya rasio produktivitas memutus perkara di MA yang tercatat mencapai 99,10 persen,” kata dia.



Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau yang kerap disapa Bamsoet menilai Mahkamah Agung (MA) berhasil menerapkan peradilan elektronik atau e-Court yang dilakukan sepanjang tahun 2021.

“Selain penanganan perkara, MA juga berhasil mempercepat transformasi peradilan konvensional menuju sistem elektronik,” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Jumlah perkara yang didaftarkan melalui e-Court pada pengadilan tingkat pertama di tahun 2021 meningkat 20,37 persen. Dari 186.986 perkara pada 2020 naik menjadi 225.072 perkara di 2021.

Dari 19.408 perkara yang masuk sepanjang 2021, MA telah memutus 19.233 perkara dan hanya menyisakan 175 perkara. Selain itu, waktu putusan perkara juga menjadi lebih cepat. Sebanyak 18.895 dari 19.233 perkara diputus dalam waktu di bawah tiga bulan,” ujarnya.

Tidak hanya di persidangan, MA juga telah mengagakkan keadilan melalui mediasi pada perkara perdata dan perdata agama, serta diversifikasi pada perkara tindak pidana anak. Penanganan mediasi tercatat meningkat dari 5.177 perkara di 2020 menjadi 10.152 di 2021. Tidak hanya itu, diversifikasi juga meningkat dari 24 perkara di tahun 2020 menjadi 30 perkara di tahun 2021.

Terakhir, kata dia, kontribusi keuangan MA juga terlihat pada jumlah pidana denda dan uang pengganti pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada perkara pelanggaran lalu lintas, korupsi, narkoba, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dan perkara pidana lainnya.

Jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan putusan MA mencapai Rp21,996 triliun. Pada pengadilan tingkat pertama mencapai Rp51,905 triliun dan kontribusi dari penarikan PNBPN mencapai Rp76,252 miliar.



Jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan putusan MA capai **Rp21,9 T**

” Tingkat kepuasan terhadap putusan kasasi sebesar 90,22 persen

Jakarta (ANTARA) - Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Syarifuddin mengungkapkan jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan putusan Mahkamah Agung mencapai Rp21,99 triliun.

Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2021 yang disiarkan di kanal YouTube Mahkamah Agung Republik Indonesia, dipantau dari Jakarta, Selasa, jumlah pidana denda dan uang pengganti tersebut berdasarkan pada putusan-putusan berkekuatan hukum tetap

perkara pelanggaran lalu lintas, tindak pidana korupsi, narkoba, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dan perkara-perkara pidana lainnya.

“Jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama yang berkekuatan hukum tetap di lingkungan peradilan umum dan peradilan militer adalah sebesar Rp51.905.031.913.135,00 (Rp.51,90 triliun, red.)” kata Syarifuddin.

Selain itu, kontribusi dari penarikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada tahun 2021, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan adalah sebesar Rp76,25 miliar.

Dalam kesempatan yang sama, Syarifuddin juga mengatakan bahwa tingkat kepuasan para pihak terhadap putusan pengadilan tingkat pertama mencapai 97,29 persen.

Sementara itu, di tingkat banding, perkara yang diajukan kasasi adalah sebanyak 13.678 perkara atau sebesar 49,15 persen dari keseluruhan perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat banding.

“Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan para pihak atas putusan pengadilan tingkat banding adalah sebesar 50,85 persen,” ucapnya.

Pada tingkat kasasi, putusan yang diajukan peninjauan kembali berjumlah 1.338 perkara atau sebesar 9,78 persen dari keseluruhan putusan kasasi. Dengan kata lain, tingkat kepuasan terhadap putusan kasasi adalah sebesar 90,22 persen.

Tingkat kepuasan
para pihak terhadap putusan
pengadilan tingkat pertama
mencapai

97,29%

Sementara itu, di tingkat
banding, mencapai

50,85%

Dan tingkat kepuasan terhadap
putusan kasasi, mencapai



Presiden

apresiasi MA percepat transformasi hukum di Indonesia

Transformasi hukum menjadi tahapan penting pemberian pelayanan peradilan yang lebih baik bagi masyarakat pencari keadilan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi Mahkamah Agung yang telah bekerja keras mempercepat transformasi hukum di Indonesia, di antaranya dengan mengakselerasi pembangunan sistem peradilan modern.

“Pemerintah sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih ke Mahkamah Agung yang telah bekerja keras mengakselerasi pembangunan pengadilan modern, mentransformasikan dari sistem peradilan konvensional ke sistem peradilan yang lebih modern

untuk mempercepat transformasi hukum di Indonesia,” kata Presiden Jokowi saat menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2021 secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Selasa.

Transformasi hukum, menurut Presiden, menjadi tahapan penting pemberian pelayanan peradilan yang lebih baik bagi masyarakat pencari keadilan.



“Pelayanan peradilan yang lebih cepat, lebih mudah, yang sederhana, yang berbiaya ringan, dan profesional serta memastikan penegakan hukum yang berkeadilan,” kata Presiden.

Semangat transformasi di tubuh MA, kata Presiden, juga selaras dengan transformasi Indonesia yang sedang dilakukan pemerintah di segala aspek.

Lebih lanjut, Presiden berharap MA dapat menghasilkan putusan-putusan penting (landmark decisions) untuk memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, bagi pelaku usaha dan investor, serta untuk melindungi aset-aset negara dan publik.

Jokowi juga berharap MA dapat memberikan putusan-putusan penting yang memberikan efek jera bagi koruptor dan mafia hukum yang telah mencederai rasa keadilan.

Presiden juga memandang bahwa model-model alternatif penyelesaian perkara perlu untuk mengurangi beban pengadilan. Model alternatif itu seperti mengedepankan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata.

“Mengedepankan restorative justice (keadilan restoratif) untuk perkara pidana serta proses dialog yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait secara profesional, transparan, dan akuntabel agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud,” kata Presiden.

Turut mendampingi Presiden Jokowi saat menghadiri secara virtual Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2021, yakni Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

MA selesaikan 129.575 Perkara pidana secara elektronik pada 2021

Jakarta (ANTARA) - Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Syarifuddin mengatakan pihaknya sepanjang 2021 telah menyelesaikan sebanyak 129.575 perkara pidana melalui sistem persidangan elektronik.

“Gambaran tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan elektronik telah berjalan secara efektif,” kata Syarifuddin ketika menyampaikan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2021 yang disiarkan di kanal YouTube Mahkamah Agung Republik Indonesia, dipantau dari Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan catatan dari Mahkamah Agung terkait dengan penyelesaian perkara pidana di luar perkara pelanggaran lalu lintas, perkara pidana militer, serta perkara jinayat setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik.

Lebih lanjut, Syarifuddin juga mengungkapkan bahwa, pada tahun 2021 jumlah perkara perdata, perkara perdata agama, dan perkara tata usaha negara yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di tingkat pengadilan mencapai 225.072 perkara.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.817 perkara telah disidangkan secara e-Litigation.

“Meningkat sebesar 20,37 persen dibandingkan tahun 2020,” ucapnya.

Sementara itu, pada pengadilan tingkat banding, jumlah perkara banding yang telah didaftarkan dengan menggunakan aplikasi e-Court pada tahun 2021 sebanyak 1.876 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.712 perkara telah selesai diputus.

Tidak terbatas pada gambaran jumlah perkara, Syarifuddin menyebutkan jumlah pengguna terdaftar dan pengguna lainnya yang menggunakan layanan e-Court.

Sampai dengan 31 Desember 2021, tercatat 208.851 pengguna, yang terdiri atas 48.002 pengguna terdaftar dari kalangan advokat, dan 160.849 pengguna lainnya dari kalangan perorangan, pemerintah, badan hukum, dan kuasa insidental.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa percepatan pemberlakuan sistem peradilan elektronik dipengaruhi oleh situasi darurat akibat munculnya pandemi COVID-19,” kata Syarifuddin.

Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pembatasan pertemuan secara fisik di ruang sidang telah mempercepat implementasi dari rencana kerja yang termuat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010—2035.

“Inilah yang saya sebut sebagai hikmah di balik datangnya musibah,” tuturnya.





Sistem Persidangan Elektronik

“Pada tahun 2021 jumlah perkara perdata, perkara perdata agama, dan perkara tata usaha negara yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di tingkat pengadilan mencapai 225.072 perkara.”

PERMA Nomor 4 Tahun 2020

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik

1.876 1.712

Perkara banding yang telah didaftarkan dengan menggunakan aplikasi e-Court pada tahun 2021

Perkara yang telah selesai diputus



208.851

48.002 pengguna (Advokat) dan 160.849 pengguna (Lainnya)



11.817



Perkara yang telah disidangkan secara e-Litigation

Aplikasi e-Court di tingkat Pengadilan mencapai 225.072 perkara



Perkara perdata, Perkara perdata agama dan Perkara tata usaha negara

20,37%

Peningkatannya dibandingkan

Pandemi Covid-19

Mengakibatkan pembatasan pertemuan secara fisik di ruang sidang telah mempercepat implementasi dari rencana kerja yang termuat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010—2035.

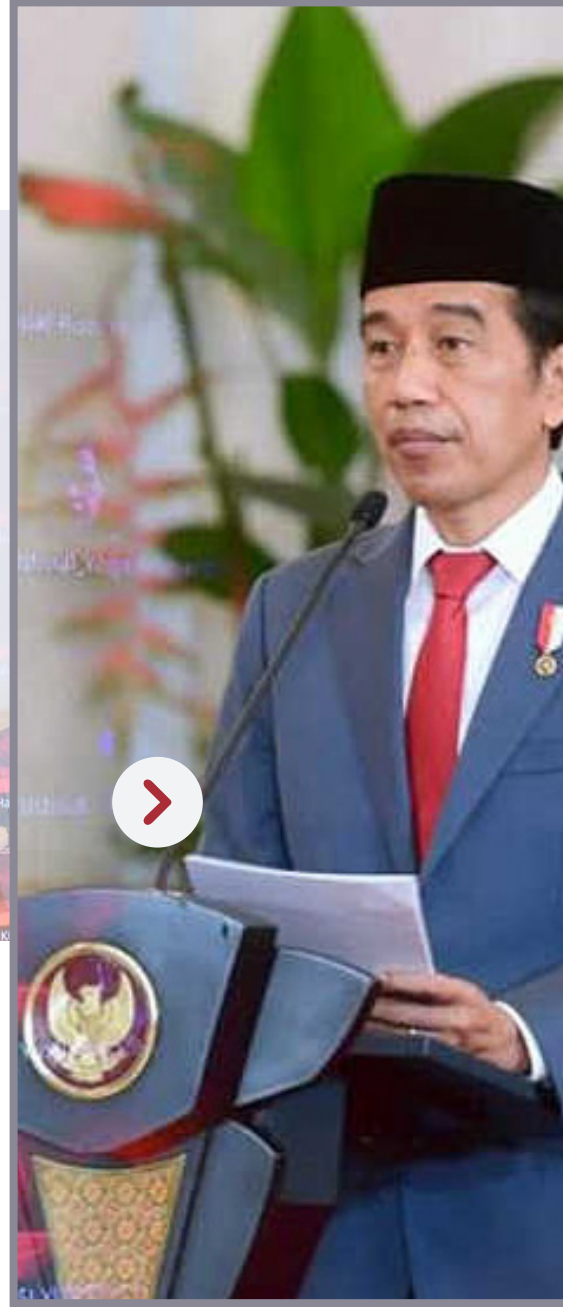
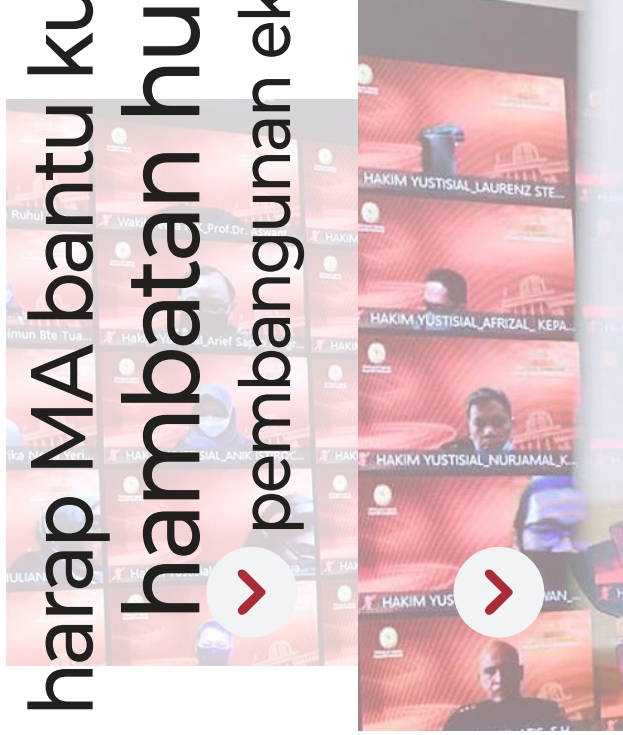
“Tidak dapat dipungkiri bahwa percepatan pemberlakuan sistem peradilan elektronik dipengaruhi oleh situasi darurat akibat munculnya pandemi COVID-19,”

– Syarifuddin –



Presiden

harap MA bantu kurangi hambatan hukum > pembangunan ekonomi >





Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo berharap Mahkamah Agung (MA) bisa melakukan upaya-upaya strategis dalam mengurangi hambatan-hambatan hukum untuk percepatan pembangunan ekonomi.

“Kami berharap Mahkamah Agung terus melakukan upaya-upaya strategis dalam mengurangi hambatan-hambatan hukum untuk percepatan pembangunan ekonomi,” kata Presiden Jokowi saat menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2021 secara virtual dari Istana Negara Jakarta, Selasa.

Presiden menyebutkan upaya strategis tersebut antara lain dapat dilakukan dengan mempercepat penanganan perkara.

“Antara lain melalui percepatan penanganan perkara melalui mekanisme gugatan sederhana, mendorong konsistensi putusan serta melakukan reformasi pelaksanaan putusan,” tambahnya.

Pemerintah juga meyakini penegakan hukum secara efektif oleh MA dapat berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan dan kestabilan sosial, memperkuat sistem demokrasi, dan mempercepat transformasi menuju Indonesia maju.

Presiden menyampaikan apresiasi atas kerja keras MA yang bekerja keras mempercepat transformasi hukum di Indonesia.

“Terima kasih kepada Mahkamah Agung yang telah bekerja keras mengakselerasi pembangunan pengadilan modern, mentransformasikan dari sistem peradilan konvensional ke sistem peradilan yang lebih modern untuk mempercepat transformasi hukum di Indonesia,” tutur Presiden.

Sementara itu, Ketua MA Muhammad Syarifuddin dalam laporannya menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2021 MA mengampu 19.408 beban perkara, yang 19.233 di antaranya sudah diputus, sementara 175 perkara sisanya masih dalam proses peradilan.

“Jumlah sisa perkara tersebut merupakan rekor terendah yang pernah dicapai dalam sejarah Mahkamah Agung,” kata Syarifuddin.

Berdasar data penyelesaian perkara tersebut, rasio produktivitas putusan MA 2021 mencapai 99,10 persen atau melampaui target 70 persen yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama MA.

Rasio produktivitas memutus MA tahun 2021 capai 99,10 persen



“Semua parameter pengukuran kinerja penanganan perkara pada Mahkamah Agung pada tahun 2021 telah berhasil melampaui target”

Jakarta (ANTARA) - Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin menerangkan bahwa rasio produktivitas memutus Mahkamah Agung pada tahun 2021 mencapai 99,10 persen atau lebih tinggi dari indikator kerja utama sebesar 70 persen.

“Rasio produktivitas memutus perkara mengalami peningkatan sebesar 0,06 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020,” kata Syarifuddin ketika menyampaikan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2021 yang disiarkan di kanal YouTube Mahkamah Agung Republik Indonesia, dipantau dari Jakarta, Selasa.

Angka tersebut berdasarkan pada jumlah penyelesaian perkara yang menjadi beban Mahkamah Agung pada tahun 2021. Adapun jumlah beban perkara MA pada tahun 2021 sebanyak 19.408 perkara, yang terdiri atas perkara masuk tahun 2021 sebanyak 19.209 perkara dan sisa perkara tahun lalu sebanyak 199 perkara.

Dari jumlah beban perkara tersebut, Mahkamah Agung selama 2021 berhasil memutus sebanyak 19.233 perkara sehingga sisa perkara tahun 2021 tercatat 175 perkara.

“Jumlah sisa perkara tersebut merupakan rekor terendah yang pernah dicapai dalam sejarah Mahkamah Agung,” ucap Syarifuddin.

Pada tahun 2021, Mahkamah Agung menerima perkara dengan jumlah 6,5 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2020. Dengan demikian, beban penanganan perkara juga berkurang sebesar 6,52 persen.

“Hal tersebut mengakibatkan jumlah perkara yang diputus juga menjadi berkurang sebanyak 6,46 persen,” kata Syarifuddin.

Berkurangnya jumlah perkara masuk pada tahun 2021, menurut dia, dipengaruhi oleh penurunan jumlah

permohonan peninjauan kembali perkara pajak sebesar 33,53 persen. Namun, untuk perkara perdata, perdata khusus, pidana, pidana khusus, dan perdata agama pada tahun 2021 justru mengalami peningkatan.

Disebutkan pula jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju. Sepanjang 2021, Mahkamah Agung telah berhasil mengirim salinan putusan sebanyak 21.586 perkara.

“Jumlah tersebut menunjukkan bahwa rasio penyelesaian perkara pada tahun 2021 adalah sebesar 112,37 persen,” tuturnya.

Jumlah perkara yang diputus Mahkamah Agung di bawah 3 bulan sebanyak 18.805 perkara, atau sebesar 97,77 persen dari total 19.233 perkara. Jumlah tersebut, kata Syarifuddin, telah melampaui capaian kinerja tahun 2020, yaitu sebesar 96,65 persen.

Semua parameter pengukuran kinerja penanganan perkara pada Mahkamah Agung pada tahun 2021, menurut dia, telah berhasil melampaui semua target, bahkan sebagian besar merupakan capaian terbaik sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung.

Presiden: Pemerintah butuh dukungan MA untuk transformasi Indonesia



Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Pemerintah memerlukan dukungan dari Mahkamah Agung (MA), sebagai pengawal keadilan, dalam menjalankan semua agenda transformasi Indonesia.

“Pemerintah butuh dukungan dari Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan tinggi, pengadilan negeri di seluruh Tanah Air Indonesia. Peran Mahkamah Agung sebagai pengawal keadilan sangat krusial dalam mendukung transformasi Indonesia,” kata Presiden Jokowi saat menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2021 secara virtual dari Istana Negara Jakarta, Selasa.

Dukungan MA dan lembaga peradilan sangat dibutuhkan, karena semua agenda reformasi di

Indonesia tidak mungkin bisa dijalankan sendiri oleh Pemerintah sebagai lembaga eksekutif.

Peran MA dibutuhkan sebagai lembaga yang dapat menghasilkan putusan-putusan penting atau landmark decisions, yang memberikan kepastian hukum berkeadilan bagi seluruh masyarakat, tambahnya.

“Landmark decisions yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pelaku usaha dan investor, yang melindungi aset-aset negara dan aset publik lainnya, serta memberikan efek jera bagi koruptor dan mafia hukum yang mencederai rasa keadilan,” kata Presiden.

Saat ini, Pemerintah sedang mengawal beberapa agenda transformasi penting, seperti peningkatan pemerataan pembangunan yang lebih Indonesia sentris, memperluas hilirisasi agar nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA) lebih banyak dinikmati masyarakat, serta mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) naik kelas antara lain melalui digitalisasi.

Agenda transformasi lainnya adalah memperkuat ekonomi hijau agar lebih sehat dan menyejahterakan rakyat, mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan, dan memperkuat ekonomi biru agar kekayaan maritim Indonesia dapat lestari dan menyejahterakan rakyat.

“Transformasi juga kita lakukan di bidang hukum melalui reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi, dalam rangka mendukung kepastian hukum dan kemudahan berusaha, menarik sebanyak mungkin dan menjamin keamanan investasi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing bangsa, serta memberantas tindak pidana korupsi,” ujar Presiden Jokowi.





Jokowi Hadiri

Sidang Laporan Tahunan Tahunan MA Secara Virtual

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung (MA). Jokowi hadir secara virtual dari Istana Negara, Jakarta.



Sidang tahunan MA ini disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (22/2/2022). Jokowi didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Polhukam Mahfud Md, dan Menkumham Yasonna Laoly.

Acara diawali dengan pengumandangan lagu 'Indonesia Raya'. Setelah itu, Ketua MA Syarifuddin membuka sidang laporan tahunan.

Berdasarkan keterangan tertulis dari MA, sidang laporan tahunan merupakan agenda

tahunan MA yang dilaksanakan setiap awal tahun dalam rangka menyampaikan capaian kinerja MA. Pada tahun ini, laporan tahunan mengambil tema 'Akselerasi Perwujudan Peradilan Modern'.

Tema di atas disebut merupakan rangkaian estafet dari tema-tema sebelumnya. Tema itu mengisyaratkan tentang sebuah tekad, semangat, serta optimisme dari seluruh aparaturnya Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya untuk mampu bergerak cepat, merespons, serta beradaptasi

dengan dinamika perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini.

Dalam agenda tersebut, Ketua MA memaparkan penanganan perkara selama 2021. Ketua MA juga menyampaikan capaian-capaian MA dan badan peradilan di bawahnya dalam bidang teknis yudisial, bidang kesekretariatan, dan lainnya.

Acara digelar terbuka untuk umum. Acara dilaksanakan secara hybrid dan disiarkan lewat akun YouTube MA dan Sekretariat Presiden.



Mahkamah Agung setor Rp 74 T ke Negara Sepanjang 2021

Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin mengungkapkan MA telah memberikan kontribusi keuangan ke negara hingga Rp 74 triliun sepanjang 2021. Uang tersebut berasal dari denda atau uang pengganti atas perkara-perkara yang diputus MA dan telah berkekuatan hukum tetap.





Rekor! MA Klaim Putus 19.233 Perkara Sepanjang 2021

Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin membeberkan sejumlah capaian MA selama 2021 dalam sidang laporan tahunan. Syarifuddin mengatakan, sepanjang tahun 2021 MA telah memutus 19.233 dari 19.408 perkara. Dengan sisa perkara sebanyak 175, angka itu menjadi yang terendah dalam sejarah MA.



Sepanjang 2021 MA Sanksi 250 Hakim, 3 di Antaranya Disanksi Berat

Sepanjang 2021, Mahkamah Agung (MA) menerima 3.069 aduan, di mana 2.802 di antaranya telah selesai diproses. Dari aduan tersebut, MA telah menjatuhkan sanksi disiplin terhadap 250 hakim.





Hadiri Sidang Tahunan MA, Jokowi Singgung Mafia Hukum

Presiden Joko Widodo menghadiri sidang laporan tahunan Mahkamah Agung secara virtual.

Dalam sambutannya, Jokowi menyoroti peran Mahkamah Agung dalam mendukung transformasi hukum Indonesia yang memberikan kepastian hukum berkeadilan.



MA 'Cetak' Rekor Terendah Sisa Perkara Sepanjang Sejarah

MA memutus 19.233 perkara selama 2021, di tahun 2022 menyisakan 175 perkara. MA mendapat tingkat kepuasan publik cukup tinggi, terlihat dari jumlah upaya hukum yang diajukan di setiap tingkat peradilan.



Sidang Laporan Tahunan Mahkamah Agung (Laprah MA) Republik Indonesia Tahun 2021 telah diselenggarakan pada Selasa (22/2/2022). Laporan Tahunan MA Tahun 2021 yang mengusung tema “Akselerasi Perwujudan Peradilan Modern” ini dihadiri Presiden dan Wakil Presiden RI, pimpinan lembaga negara, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua MA Negara-Negara Sahabat dan para Duta Besar, hingga para hakim/hakim agung.

Dalam laporannya, Ketua MA menyampaikan beban perkara MA di tahun 2021 mencapai 19.408 perkara. Rinciannya, terdapat 19.209 perkara masuk dengan tambahan sisa 199 perkara dari tahun sebelumnya. Lalu, MA berhasil memutus 19.233 perkara selama tahun 2021, menyisakan perkara di tahun 2022 ini sejumlah 175 perkara. Angka itu disebut sebagai jumlah sisa perkara yang menjadi rekor terendah yang pernah dicapai sepanjang sejarah MA.

“Berdasarkan data penyelesaian perkara tersebut, maka rasio produktivitas memutus MA Tahun 2021 adalah sebesar 99,10 persen atau lebih tinggi dari Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan yaitu sebesar 70 persen,” ujar Ketua Mahkamah Agung RI, Prof H.M. Syarifuddin saat menyampaikan Laptah MA Tahun 2021, Selasa (22/2/2022).

Dia mengatakan meski dalam jumlah perkara yang diterima MA selama 2021 terdapat pengurangan mencapai 6,50% dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut berimplikasi pada beban penanganan perkara yang berkurang 6,52% dan berdampak pada berkurangnya jumlah perkara yang diputus sebesar 6,46%. Tapi, terdapat peningkatan sebesar 0,06% dalam rasio produktivitas memutus perkara jika dibandingkan dengan tahun 2020.

“Berkurangnya jumlah perkara masuk tahun 2021 tersebut, dipengaruhi oleh penurunan jumlah permohonan peninjauan kembali perkara pajak sebesar 33,53%. Namun, untuk perkara perdata, perdata khusus, pidana, pidana khusus, dan perdata agama pada tahun 2021 justru mengalami peningkatan,” ujar Syarifuddin.

Jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan putusan MA dalam perkara-perkara itu mencapai angka Rp 21.995.131.485.546,20 atau sekitar Rp 21 triliun lebih. Selain itu, dari putusan pengadilan tingkat pertama yang BHT pada lingkungan peradilan umum dan peradilan militer jumlah denda dan uang pengganti sebesar Rp 51.905.031.913.135,00 (Rp 51 triliun lebih).

Atas semua itu, tingkat kepuasan publik kepada lembaga peradilan yang diukur salah satunya

dengan indikator jumlah upaya hukum yang diajukan terhadap masing-masing tingkat peradilan. Dari data MA, di luar perkara yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat, perkara pelanggaran lalu lintas (tilang), serta perkara perdata permohonan pada tahun 2021 yang diajukan upaya hukum banding sebanyak 16.377 perkara atau hanya sebesar 2,71% dari jumlah keseluruhan perkara yang diputus pengadilan tingkat pertama.

Hal tersebut, kata dia, menunjukkan tingkat kepuasan para pihak terhadap putusan pengadilan tingkat pertama sebesar 97,29%. Selanjutnya, di tingkat banding, terdapat 13.678 perkara yang diajukan kasasi atau sebesar 49,15% dari keseluruhan perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat banding. Ini menandakan tingkat kepuasan para pihak atas putusan pengadilan tingkat banding adalah sebesar 50,85%.

“Sedangkan pada tingkat kasasi, putusan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 1.338 perkara atau sebesar 9,78 persen dari keseluruhan putusan kasasi. Dengan kata lain, tingkat kepuasan terhadap putusan kasasi adalah sebesar 90,22 persen,” jelasnya.



Mahkamah Agung RI



Prof H.M. Syarifuddin
Ketua Mahkamah Agung

Rasio produktivitas
memutusi sebesar 99,10%



Laporan Tahunan

Mahkamah Agung Tahun 2021

Ruang Koesoemah Atmadja

Tingkat kepuasan
pengadilan tingkat
pertama sebesar 97,29%

Tingkat kepuasan
pengadilan tingkat banding
sebesar 50,85%

Tingkat kepuasan
terhadap putusan kasasi
sebesar 90,22%



Ketua MA: Tahun 2021, Akselerasi Perwujudan Peradilan Modern

Penanganan perkara melalui sistem peradilan elektronik di tahun 2021, tercatat sebanyak 225.072 perkara e-Court di pengadilan tingkat pertama, meningkat sebesar 20,37% dibandingkan tahun 2020. Presiden menyampaikan apresiasinya atas kerja keras MA mengakselerasi pembangunan pengadilan modern.

Sebagai agenda rutin tahunan, Mahkamah Agung (MA) menyampaikan Laporan Tahunan MA Tahun 2021, Selasa (22/2/2022). Laporan Tahunan MA Tahun 2021 ini mengusung tema "Akselerasi Perwujudan Peradilan Modern". Acara yang digelar secara hibrida, daring dan luring ini dihadiri Presiden Jokowi, pimpinan sejumlah lembaga negara, para hakim agung/hakim, serta pejabat peradilan.

"Tema tersebut merupakan rangkaian estafet dari tema-tema sebelumnya yang mengisyaratkan sebuah tekad, semangat, serta optimisme dari seluruh aparat Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya untuk mampu bergerak cepat, merespons serta beradaptasi dengan dinamika perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Peradilan modern adalah proses metamorfosa sebagai akibat dari keniscayaan atas kemajuan teknologi," ujar Ketua Mahkamah Agung RI, Prof H.M. Syarifuddin dalam pemaparannya.

Dia menjelaskan fondasi yang ada pada dasarnya telah dibangun jauh sebelum hadirnya pandemi. Tepatnya, sejak pemberlakuan aplikasi e-Court pada tahun 2018. Syarifuddin beranggapan saat ini percepatan perbaikan sistem peradilan elektronik itu tidak terlepas dari pengaruh situasi munculnya pandemi Covid-19 yang membatasi pertemuan secara fisik dalam ruang sidang. Hal itu secara tidak langsung mempercepat implementasi rencana kerja yang termuat dalam cetak biru (blueprint) Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Dulu ketika masih dalam kondisi yang normal, kata dia, tidak pernah terbayangkan bahwa proses migrasi dari sistem peradilan konvensional ke sistem peradilan elektronik dapat dilakukan hanya dalam waktu 2 tahun. Tapi dengan adanya pandemi, itu semua bisa tercapai. "Inilah yang saya sebut hikmah di balik datangnya musibah. Tahun 2021 merupakan tahun akselerasi bagi perwujudan peradilan modern melalui pemenuhan sarana IT dan sumber daya manusia," lanjutnya.

Syarifuddin mengakui adanya 910 satuan kerja pengadilan dan tambahan 13 pengadilan tingkat banding yang baru di tahun 2021 untuk memenuhi standar sarana dan prasarana IT pada setiap satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia bukan menjadi perkara mudah.

Meski terdapat batasan anggaran, MA berkomitmen untuk tetap mengupayakan setiap satuan kerja, khususnya yang berada di daerah pelosok, dapat memiliki sarpras IT setara dengan pengadilan di kota besar. Pada 2022 ini, diharapkan tidak ada lagi problema teknis yang menghambat pelayanan untuk pencari keadilan dalam proses persidangan elektronik.

Adapun terkait kinerja penanganan perkara melalui sistem peradilan elektronik (e-Court) pada tahun 2021, tercatat sebanyak 225.072 perkara di pengadilan tingkat pertama dalam lingkup perkara perdata, perkara perdata agama, dan perkara tata usaha negara yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 20,37% dibandingkan tahun 2020 lalu. Dari total yang ada, 11.817 perkara telah disidangkan secara e-Litigation.

Memang sejak berlakunya Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik, terdapat 129.575 perkara pidana di luar perkara pelanggaran lalu lintas, perkara pidana militer, dan perkara jinayat yang diselesaikan melalui sistem persidangan elektronik. Kesemua ini menunjukkan akan sistem peradilan elektronik yang secara efektif berjalan dalam seluruh jenis perkara pada empat lingkungan peradilan di bawah MA.

Penanganan perkara melalui sistem peradilan elektronik di tahun 2021, tercatat sebanyak 225.072 perkara e-Court di pengadilan tingkat pertama, meningkat sebesar 20,37% dibandingkan tahun 2020. Presiden menyampaikan apresiasinya atas kerja keras MA mengakselerasi pembangunan pengadilan modern.

Tidak hanya pada pengadilan tingkat pertama, pada pengadilan tingkat banding, terdapat 1.876 perkara yang telah didaftarkan menggunakan aplikasi e-Court selama 2021. Dengan rincian, 1.712 perkara telah selesai diputus. Hingga tanggal 31 Desember 2021, jumlah Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya yang menggunakan layanan e-Court tercatat sebanyak 208.851 pengguna.



Diantaranya terdiri atas 48.002 Pengguna Terdaftar dari kalangan Advokat dan 160.849 Pengguna Lainnya dari kalangan perorangan, pemerintah, badan hukum, dan kuasa insidentil.

Berdampak positif

Atas transformasi di tubuh MA itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang turut hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap MA. Pemerintah sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Agung yang telah bekerja keras mengakselerasi pembangunan pengadilan modern.

“MA telah melakukan mentransformasi dari pengadilan konvensional ke sistem pengadilan yang lebih modern untuk mempercepat transformasi hukum di Indonesia. Transformasi ini menjadi tahapan penting dalam memberikan pelayanan peradilan yang lebih baik bagi masyarakat pencari keadilan,” kata Presiden.

Presiden RI Joko Widodo.

Presiden Jokowi menilai adanya transformasi sistem pengadilan yang lebih modern akan memberi banyak dampak positif. Seperti penyediaan pelayanan peradilan yang lebih cepat, mudah, sederhana, berbiaya ringan, profesional, serta memastikan akan terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan. Semangat transformasi di tubuh MA itu, kata dia, selaras dengan semangat transformasi Indonesia yang tengah dilakukan pemerintah.

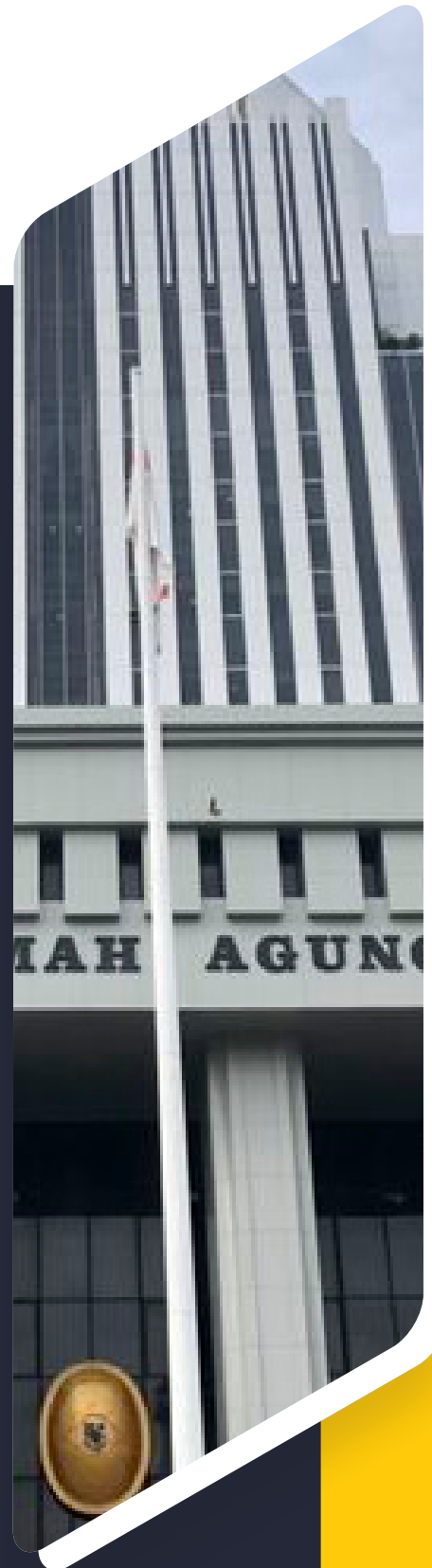
“Kami meyakini upaya penegakan hukum yang efektif oleh MA akan berkontribusi mewujudkan kesejahteraan dan kestabilan sosial. Memperkuat sistem demokrasi dan mempercepat transformasi menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan,” tutup Jokowi.

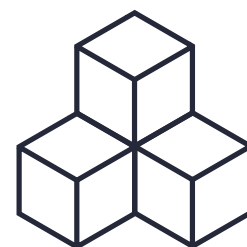


Mahkamah Agung: Pandemi Covid-19 Percepat Sistem Peradilan Konvensional ke Elektronik

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin membuka pidato laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2021. Dia mengatakan, pandemi Covid-19 mempengaruhi percepatan pemberlakuan sistem peradilan elektronik.

Sebab, selama pandemi Covid-19, pertemuan fisik di ruang sidang di pengadilan menjadi sangat dibatasi.





„Secara tidak langsung (Covid-19) juga mengimplementasi cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035,” kata Ketua MA Syarifuddin seperti dikutip dari siaran daringnya, Selasa (22/2/2022).

Syarifuddin mengaku tidak pernah membayangkan, jika proses migrasi dari sistem peradilan konvensional ke elektronik dapat dilakukan hanya dalam 2 tahun.

„Dengan adanya pandemi, hal itu dapat dilakukan. Ini lah yang saya sebut sebagai hikmah di balik datangnya musibah dan tahun 2021 merupakan tahun akselerasi bagi perwujudan peradilan modern,” ujar Syarifuddin.

Syarifuddin mengatakan, tema yang diusung dalam pidato laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2021 adalah akselerasi perwujudan peradilan modern.

„Tema tersebut adalah rangkaian estafet dari tema-tema sebelumnya yang mengisyaratkan sebuah tekad semangat serta optimisme dari seluruh aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya untuk mampu bergerak cepat, merespons dan beradaptasi dinamika sosial, serta perkembangan teknologi saat ini,” kata dia.

Syarifuddin melanjutkan, peradilan modern adalah proses metamorfosa sebagai akibat dari keniscayaan atas kemajuan teknologi. Menurut dia, pondasi peradilan modern telah dibangun jauh sebelum datangnya pandemi Covid-19 atau tepatnya sejak berlakunya aplikasi e-court tahun 2018.

MAHKAMAH AGUNG

Putus 19.233 Perkara Sepanjang 2021

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin membeberkan capaian kinerja bidang penanganan perkara MA selama tahun 2021.

Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat 19.408 beban perkara di MA pada 2021, terdiri dari perkara yang baru masuk sebanyak 19.209, ditambah dengan sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 199.

„19.408 beban perkara pada tahun 2021 di MA terbagi atas 25,29 persen perkara perdata, 7,94 persen perkara perdata khusus, 8,36 persen perkara pidana, 30,08 persen perkara pidana khusus, 5,91 persen perkara perdata agama, 1,09 persen perkara pidana militer, dan 21,33 persen perkara tata usaha negara,“ kata Syarifuddin seperti dikutip dari siaran daringnya, Selasa (22/2/2022).

Dari jumlah beban perkara yang masuk tersebut, Mahkamah Agung selama 2021 berhasil memutus sebanyak 19.233 perkara. Sehingga sisa perkara tahun ini adalah 175 perkara.

„Jumlah sisa perkara tersebut merupakan rekor terendah yang pernah dicapai dalam sejarah MA,“ ucap Syarifuddin.





Mahkamah Agung selama 2021
19.408 beban perkara



25,29 %	7,94 %	8,36 %	30,08 %	5,91 %	1,09 %	21,33 %
Perkara	Perkara	Perkara	Perkara	Perkara	Perkara	Perkara
Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana Umum	Pidana Khusus	Perdata Agama	Pidana Militer	Tata Usaha



Jokowi Minta MA Utamakan Restorative Justice dalam Perkara Pidana

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendorong Mahkamah Agung (MA) mengedepankan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata. Dia juga mengingatkan MA untuk mengedepankan restorative justice atau keadilan restoratif dalam perkara pidana.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2021 secara virtual dari Istana Negara Jakarta, Selasa (22/2). Acara ini turut dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Model-model alternatif penyelesaian perkara perlu diterapkan untuk mengurangi beban pengadilan. Mengedepankan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata, mengedepankan restorative justice untuk perkara pidana," jelas Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa.

"Serta proses dialog yang melibatkan pelaku, korban dan pihak terkait secara profesional transparan dan akuntabel agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud," sambungnya.

Misalnya, dengan mempercepat penanganan perkara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana, mendorong konsistensi putusan serta melakukan reformasi pelaksanaan putusan.

Jokowi ingin Mahkamah Agung konsisten memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan seperti, perempuan, anak dan penyandang disabilitas. Salah satunya, dengan melakukan penguatan peraturan pelayanan akses disabilitas di setiap lini pengadilan.

"Kami meyakini upaya penegakan hukum yang efektif oleh Mahkamah Agung akan berkontribusi mewujudkan kesejahteraan dan kestabilan sosial, memperkuat sistem demokrasi dan mempercepat transformasi menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan," tutur Jokowi.



Presiden: MA Pegang Peran Krusial dalam Mengawal Transformasi Indonesia

PRESIDEN Joko Widodo menyebut Mahkamah Agung (MA) memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung sejumlah agenda transformasi di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini tengah melaksanakan berbagai program besar seperti meningkatkan pemerataan pembangunan, memperkuat industri hilir, mendorong UMKM naik kelas, mewujudkan ekonomi hijau dan mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan.

“Semua agenda transformasi tersebut tidak mungkin bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Pemerintah butuh dukungan penuh dari seluruh komponen bangsa, terutama Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan tinggi, pengadilan negeri di seluruh Tanah Air,” ujar Jokowi saat menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan MA

RI 2022 secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/2). Lembaga peradilan negara tertinggi itu, dalam setiap upaya penegakan hukum, harus menghasilkan landmark decision yang pada akhirnya memberi kepastian yang berkeadilan bagi masyarakat, pelaku usaha dan investor. MA memiliki kewajiban untuk melindungi aset-aset negara dan publik, dan yang tidak kalah penting, juga harus memberi efek jera bagi koruptor dan mafia-mafia hukum yang kerap mencederai rasa keadilan.

“Kami meyakini upaya penegakan hukum yang efektif oleh Mahkamah Agung akan berkontribusi mewujudkan kesejahteraan dan kestabilan sosial, memperkuat sistem demokrasi dan mempercepat transformasi menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan,” jelas mantan wali kota Solo itu. (OL-6)

“Mahkamah Agung berkontribusi mewujudkan kesejahteraan dan kestabilan sosial, memperkuat sistem demokrasi dan mempercepat transformasi menuju Indonesia maju”





REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo mengapresiasi Mahkamah Agung (MA) atas langkah dalam melakukan akselerasi pengadilan modern.

Jokowi mengatakan MA telah bertransformasi dari pengadilan konvensional ke sistem peradilan yang lebih modern untuk mempercepat transformasi hukum di Indonesia.

Ia menilai, transformasi tersebut menjadi tahapan penting dalam pemberian pelayanan peradilan yang lebih baik bagi masyarakat.

Jokowi Apresiasi MA Ciptakan Peradilan Modern



Transformasi di Mahkamah Agung Diapresiasi

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi langkah Mahkamah Agung yang mempercepat transformasi hukum di Indonesia dari sistem pengadilan konvensional ke sistem pengadilan yang lebih modern. MA, kata Jokowi, juga telah berupaya mengakselerasi pembangunan pengadilan modern.

Jokowi menyampaikan itu dalam acara Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2021 secara virtual di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/2). "Transformasi ini menjadi tahapan penting dalam memberikan pelayanan peradilan yang lebih baik bagi masyarakat pencari keadilan. Pelayanan peradilan yang lebih cepat dan lebih mudah, yang sederhana, berbiaya ringan, dan profesional, serta memastikan terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan," kata Jokowi.

Ia menyampaikan, semangat transformasi Mahkamah Agung selaras dengan semangat transformasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam bidang hukum, transformasi dilakukan melalui reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha.

Namun, pemerintah membutuhkan dukungan dari MA untuk melakukan berbagai agenda transformasi. Jokowi mengatakan, seluruh agenda transformasi pemerintah tak bisa hanya dikerjakan sendiri oleh pemerintah saja, namun juga membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa, termasuk dari lembaga legislatif dan juga yudikatif.

Indonesia. Mahkamah Agung menghasilkan putusan-putusan penting yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

"Memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pelaku usaha dan investor, yang melindungi aset-aset negara dan aset publik lainnya, serta memberikan efek jera bagi koruptor dan mafia-mafia hukum yang mencederai rasa keadilan," kata dia.

Presiden pun berharap Mahkamah Agung terus melakukan upaya strategis dalam mengurangi hambatan hukum yang dapat terjadi. Selain itu, ia juga berharap agar MA konsisten dalam memperkuat peradilan bagi kelompok rentan.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Syarifuddin dalam laporannya menyampaikan, secara tidak langsung pandemi telah mempercepat implementasi rencana kerja yang termuat dalam cetak biru pembauran peradilan tahun 2010-2035.

"Dulu ketika masih dalam kondisi yang normal, kita tidak pernah membayangkan bahwa proses migrasi dari sistem peradilan konvensional ke sistem peradilan elektronik dapat dilakukan hanya dalam waktu dua tahun. Namun dengan adanya pandemi, semua itu dapat dilakukan," kata dia.

Ketua MA Sampaikan Tahunan 2021

KBRN Jakarta: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H, memimpin Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung di ruang Koesoemah Atmadja lantai 14, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta pada Selasa (22/2/2022) pukul 08.00. WIB.

“Laporan Tahunan (Laptah) Mahkamah Agung merupakan agenda tahunan Mahkamah Agung yang dilaksanakan setiap awal tahun dalam rangka menyampaikan capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung selama setahun sebelumnya,” ucap Ketua MA.

Menurutnya, tahun ini, laporan tahunan mengambil tema Akselerasi Perwujudan Peradilan Modern.

“Tema tersebut merupakan rangkaian estafet dari tema-tema sebelumnya yang mengisyaratkan tentang sebuah tekad, semangat, serta optimisme dari seluruh aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya untuk mampu bergerak cepat, merespons serta beradaptasi dengan dinamika perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini.” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung memaparkan penanganan perkara selama 2021, capaian-capaian Mahkamah Agung dan badan

peradilan di bawahnya dalam dua bagian besar, yaitu capaian di bidang teknis yudisial dan capaian di bidang kesekretariatan, dan lain-lain.

“Terkait dengan penanganan perkara di tahun 2021, beban perkara pada Mahkamah Agung tahun 2021 adalah sebanyak 19.408 (sembilan belas ribu empat ratus delapan) perkara, yang terdiri dari perkara masuk sebanyak 19.209 (sembilan belas ribu dua ratus sembilan) perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun lalu sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) perkara,” ujarnya.

Dikatakannya, dari jumlah beban tersebut Mahkamah Agung berhasil memutus selama tahun 2021 sebanyak 19.233 (sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh tiga) perkara, sehingga sisa perkara tahun ini adalah sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) perkara.

“Jumlah sisa perkara tersebut merupakan rekor terendah yang pernah dicapai sepanjang sejarah Mahkamah Agung,” tandasnya.

19.233

Perkara yang diputus pada tahun 2021

Perkara kirim ke Pengadilan Pengaju sepanjang tahun 2021

21.586

Rasio Produktivitas memutus perkara meningkat

0,06%

dibandingkan dengan tahun 2020

Permohonan peninjauan kembali perkara pajak hingga mencapai 33.53%

Tahun 2021

96,65%

Melampaui capaian kinerja Tahun 2020



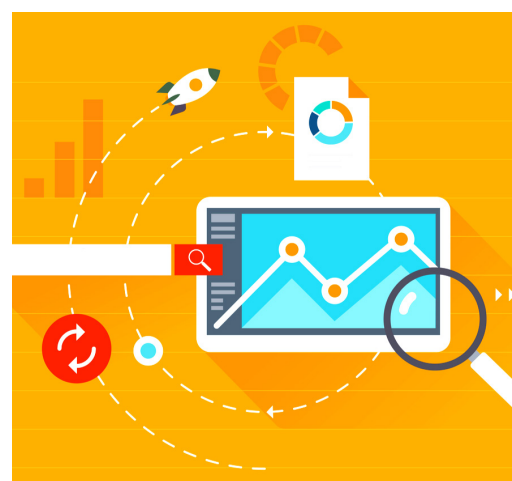
Berdasarkan data penyelesaian perkara tersebut, maka rasio produktivitas memutus Mahkamah Agung pada tahun 2021 adalah sebesar 99,10% atau lebih tinggi dari Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan, yaitu sebesar 70%. Lebih lanjut Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., mengatakan Jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2021 berkurang 6,50% dibandingkan dengan tahun 2020, sehingga beban penanganan perkara juga berkurang sebesar 6,52% hal tersebut mengakibatkan pada jumlah perkara yang diputus juga menjadi berkurang sebesar 6,46%.

“Rasio produktivitas memutus perkara mengalami peningkatan sebesar 0,06% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Berkurangnya jumlah perkara masuk tahun 2021 dipengaruhi oleh penurunan jumlah permohonan peninjauan kembali perkara pajak hingga mencapai 33,53%. Namun, untuk perkara perdata, perdata khusus, pidana, pidana khusus, dan perdata agama pada tahun 2021 justru mengalami peningkatan.”
katanya.

Selanjutnya mengenai jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju. Pada tahun 2021 Mahkamah Agung telah berhasil mengirim salinan putusan sebanyak 21.586 (dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh enam) perkara. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa rasio penyelesaian perkara pada tahun 2021 adalah sebesar 112,37%. Jumlah perkara yang diputus Mahkamah Agung di bawah 3 bulan sebanyak 18.805 (delapan belas ribu delapan ratus lima) perkara dari total sebanyak 19.233 (sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh tiga) perkara atau sebesar 97,77%

“Jumlah tersebut telah melampaui capaian kinerja tahun 2020, yaitu sebesar 96,65%.” paparnya

Uraian di atas menunjukkan bahwa semua parameter pengukuran kinerja penanganan perkara pada Mahkamah Agung tahun 2021 telah berhasil melampaui semua target yang ditetapkan dan sebagian besar berhasil mencatatkan rekor sebagai capaian terbaik sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung. (imr)



Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Agung RI



Mahkamah Agung Berhasil Lampau Target pada 2021



1. Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin saat memimpin Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung di ruang Koesoemah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa 22 Februari 2022. Ketua Mahkamah Agung akan memaparkan penangana perkara selama 2021, capaian-capaian Mahkamah Agung dan Badan peradilan.

2. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) tahun 2021 secara virtual di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, 22 Februari 2022. Ketua Mahkamah Agung, Syarifuddin mengatakan, semua target Mahkamah Agung pada tahun 2021 berhasil dilampaui dan mencatatkan rekor sebagai capaian terbaik sepanjang berdirinya Mahkamah Agung.

3. Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, saat Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa 22 Februari 2022. Sidang Istimewa Laporan Tahunan ini terbuka untuk umum ini akan dilaksanakan secara hybrid dan disiarkan secara langsung melalui kanal youtube Mahkamah Agung.

4. Sejumlah Hakim menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa 22 Februari

5. Sejumlah Hakim menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa 22 Februari 2022.



Jokowi Dorong MA Utamakan Mediasi dan Restorative Justice Selesaikan Perkara

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendorong agar Mahkamah Agung mengedepankan model-model alternatif penyelesaian perkara di Indonesia. Seperti dengan mengedepankan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata dan restorative justice untuk perkara pidana.

“Model-model alternatif penyelesaian perkara perlu diterapkan untuk mengurangi beban pengadilan,” ujar Jokowi dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung, Selasa, 22 Februari 2022.

Dengan transformasi menuju ke arah penyelesaian hukum yang lebih modern itu, Jokowi berharap pelayanan peradilan yang lebih cepat dan lebih mudah, yang sederhana, berbiaya ringan dan profesional serta memastikan terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan.

Selain itu, Jokowi juga mendorong sistem peradilan di Indonesia mengedepankan proses dialog yang melibatkan pelaku, korban dan pihak terkait secara profesional, transparan, dan akuntabel agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud.

Lebih lanjut, Jokowi berharap Mahkamah Agung terus melakukan upaya-upaya strategis dalam mengurangi hambatan-hambatan hukum untuk percepatan pembangunan ekonomi. Seperti misalnya melalui percepatan penanganan perkara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana, mendorong konsistensi putusan, serta melakukan reformasi pelaksanaan putusan.

“Kami juga berharap agar Mahkamah Agung tetap konsisten dalam memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan yaitu perempuan, anak dan penyandang disabilitas melalui penguatan peraturan, layanan dan akses disabilitas di setiap lini pengadilan,” ujar Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu menerangkan peran Mahkamah Agung dalam mengawal keadilan sangat krusial. Apalagi, menurut Jokowi Indonesia saat ini sedang bertransformasi dalam banyak hal khususnya di bidang pembangunan dan ekonomi.

Dengan kondisi kepastian hukum yang semakin baik berkat Mahkamah Agung, Jokowi yakin transformasi tersebut dapat semakin berjalan mulus.

“Dengan menghasilkan landmark decision yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pelaku usaha dan investor, yang melindungi aset-aset negara, dan aset-aset publik lainnya serta memberikan efek jera bagi koruptor dan mafia-mafia hukum yang menciderai rasa keadilan,” kata Jokowi.



Jokowi Sebut Pemerintah Butuh Dukungan MA Jalankan Agenda Reformasi

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Pemerintah memerlukan dukungan dari Mahkamah Agung (MA) dalam menjalankan semua agenda transformasi Indonesia.

“Pemerintah butuh dukungan dari Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan tinggi, pengadilan negeri di seluruh Tanah Air Indonesia. Peran Mahkamah Agung sebagai pengawal keadilan sangat krusial dalam mendukung transformasi Indonesia,” kata Presiden Jokowi saat menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2021 secara virtual dari Istana Negara Jakarta, Selasa 22 Februari 2022.

Dukungan MA dan lembaga peradilan sangat dibutuhkan, karena semua agenda reformasi di Indonesia tidak mungkin bisa dijalankan sendiri oleh Pemerintah sebagai lembaga eksekutif.

“Peran MA dibutuhkan sebagai lembaga yang dapat menghasilkan putusan-putusan penting atau landmark decisions, yang memberikan kepastian hukum berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.

Landmark decisions disebut Jokowi, memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pelaku usaha dan investor, yang melindungi aset-aset negara dan aset publik lainnya. Selain itu, lanjut Jokowi, memberikan efek jera bagi koruptor dan mafia hukum yang mencederai rasa keadilan.

TEMPO.CO

Saat ini, Pemerintah sedang mengawal beberapa agenda transformasi penting, seperti peningkatan pemerataan pembangunan yang lebih Indonesia sentris, memperluas hilirisasi agar nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA) lebih banyak dinikmati masyarakat, serta mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) naik kelas antara lain melalui digitalisasi.

Agenda transformasi lainnya adalah memperkuat ekonomi hijau agar lebih sehat dan menyejahterakan rakyat, mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan, dan memperkuat ekonomi biru agar kekayaan maritim Indonesia dapat lestari dan menyejahterakan rakyat.

” Landmark decisions memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat...”





Ketua MA Pamer Rekor Penyelesaian Perkara di Depan Jokowi



tirto.id - Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin mengklaim kinerja lembaganya kembali menyentuh rekor terendah jumlah sisa perkara. Ia mencatat bahwa jumlah perkara sisa 2021 mencapai 175 atau lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai 199 perkara.

Syarifuddin melaporkan beban perkara yang masuk ke MA pada 2021 mencapai 19.408, yang terdiri atas 19.209 perkara dan sisa perkara 199. Kini, jumlah perkara yang tersisa di 2021 mencapai 175 perkara dengan rasio putusan 99,1 persen. "Dari jumlah beban perkara tersebut Mahkamah Agung selama tahun 2021 berhasil memutus sebanyak 19.233 perkara, sehingga sisa perkara tahun ini adalah sebanyak 175 perkara. Jumlah sisa perkara tersebut merupakan rekor terendah yang pernah dicapai dalam sejarah Mahkamah Agung," kata Syarifuddin dalam Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan MA 2021 yang dihadiri Presiden Jokowi, Selasa (22/2/2022).

Syarifuddin mengatakan, angka produktivitas putusan MA tahun 2021 lebih tinggi dari indikator kinerja 2021 yang mencapai 70 persen. Kemudian, ia juga melaporkan jumlah perkara yang diterima MA berkurang sebesar 6,5 persen dibanding 2020 lalu. Penurunan perkara mengurangi beban perkara 6,52 persen.

Pengurangan perkara dipengaruhi pengurangan permohonan peninjauan kembali perkara pajak sebesar 33,53 persen walau ada kenaikan permohonan peninjauan kembali di perkara perdata, perdata khusus, pidana, pidana khusus dan perdata agama. Syarifuddin juga melaporkan, jumlah perkara yang diputus MA di bawah tiga bulan sebanyak 18.805 kasus atau 97,77 persen dari total perkara 19.233 kasus.

Sementara itu, pengadilan tinggi banding di lingkungan peradilan termasuk pengadilan pajak mencapai 51.352 perkara dengan terdiri atas 41.342 kasus di tahun 2021 dan sisa perkara 2020 sebanyak 10.010 perkara. Perkara

yang diputus di tingkat banding 36.678 perkara dengan rasio penyelesaian perkara 71,48 persen.

Sementara itu, beban perkara di tingkat pertama 2.767.247 perkara dengan rincian perkara masuk 2021 mencapai 2.691.649 dan sisa perkara tahun 2020 sebanyak 75.598 perkara. Jumlah perkara yang diputus mencapai 2.652.790 perkara kemudian perkara yang dicabut 53.147 perkara sehingga sisa perkara 2021 mencapai 61.310 perkara. "Dengan demikian, rasio produktivitas memutus perkara di Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebesar 97,78%," pungkas mantan Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung itu.



tirto.id



Jokowi Dorong MA Perkuat Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan

Joko Widodo (Jokowi) mendorong Mahkamah Agung (MA) memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas di setiap lini pengadilan.

Ia juga mengapresiasi kinerja MA yang telah mentransformasi sistem peradilan menjadi lebih modern. "Transformasi ini menjadi tahapan penting dalam memberikan pelayanan peradilan yang lebih baik bagi masyarakat pencari keadilan.

Pelayanan peradilan yang lebih cepat dan lebih mudah, yang sederhana, berbiaya ringan, dan profesional serta memastikan terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan," kata Jokowi saat memberi sambutan di Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan MA 2021 secara daring dari Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/2/2022).

Jokowi mengklaim semangat transformasi yang dilakukan MA sama dengan program transformatif yang tengah dirintis pemerintah. Misalnya saja pembangunan berbasis Indonesia-sentris, perluasan hilirisasi, digitalisasi UMKM, pelaksanaan ekonomi hijau, percepatan transisi energi terbarukan hingga memperkuat ekonomi biru. "Transformasi juga kita lakukan di bidang hukum melalui reformasi struktural, deregulasi dan debirokratisasi dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha, menarik sebanyak mungkin dan menjamin keamanan investasi, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan daya saing bangsa serta memberantas tindak pidana korupsi," tutur Jokowi.

Menurut Jokowi, peran MA sangat penting dalam transformasi Indonesia. Ia menilai, lembaga yang kini dipimpin Muhammad Syarifuddin itu berfungsi sebagai landmark decision yang berguna memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. "Peran Mahkamah Agung sebagai pengawal keadilan sangat krusial dalam mendukung transformasi Indonesia dengan menghasilkan landmark decision yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pelaku usaha dan investor, yang melindungi aset-aset negara dan aset-aset publik lainnya serta memberikan

efek jera bagi koruptor dan mafia-mafia hukum yang mencederai rasa keadilan," tutur Jokowi. Jokowi memandang MA perlu mendorong penyelesaian perkara alternatif demi menekan biaya. Jokowi juga ingin agar penyelesaian perkara perdata diselesaikan dengan konsep mediasi. Sementara itu, pendekatan restorative justice diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana pidana.

Ia juga ingin proses dialog antara korban, pelaku dan pihak terkait menjadi poin utama agar penyelesaian perkara bisa profesional, transparan dan akuntabel demi meraih konsep penegakan hukum berkeadilan. Jokowi berharap MA bisa terus melakukan upaya strategis dalam menyelesaikan hambatan hukum demi pembangunan ekonomi. Beberapa opsi yang didorong adalah dengan penerapan mekanisme gugatan sederhana untuk percepatan perkara perdata, konsistensi putusan dan penguatan akses bagi kelompok rentan. "Kami juga berharap agar Mahkamah Agung tetap konsisten dalam memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan, yaitu perempuan, anak dan penyandang disabilitas melalui penguatan peraturan layanan dan akses disabilitas di setiap lini pengadilan," pungkas Jokowi.



Presiden Jokowi Dorong MA Terapkan Model Alternatif Penyelesaian Perkara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan peran Mahkamah Agung sebagai pengawal keadilan sangat krusial dalam mendukung transformasi Indonesia.

Di antaranya dengan menghasilkan landmark decisions (keputusan penting) yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

“yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pelaku usaha dan investor, yang melindungi aset-aset negara dan aset-aset publik lainnya serta memberikan efek jera bagi koruptor dan mafia-mafia hukum yang menciderai rasa keadilan,” kata Jokowi dalam acara Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan MA 2021, secara virtual Selasa, (22/2/2022).

Presiden berpesan agar MA terapkan model alternatif penyelesaian perkara untuk mengurangi beban pengadilan.

Di antaranya mengedepankan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata dan mengedepankan restorative justice atau keadilan restoratif untuk perkara pidana.

“Serta proses dialog yang melibatkan pelaku, korban dan pihak terkait secara profesional, transparan dan akuntabel agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud,” katanya.

Kepala Negara berharap MA terus melakukan upaya-upaya strategis dalam mengurangi hambatan-hambatan hukum untuk percepatan pembangunan ekonomi.

Antara lain melalui percepatan perkara penanganan perdata melalui mekanisme gugatan sederhana, mendorong konsistensi putusan serta melakukan reformasi pelaksanaan putusan.

“Kami juga berharap agar MA tetap konsisten dalam memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan, yaitu perempuan, anak dan penyandang disabilitas melalui penguatan peraturan layanan dan akses disabilitas di setiap lini pengadilan,”





Mahkamah Agung Putus 19.233 Perkara Selama 2021

VIVA – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menggelar Sidang Istimewa untuk menyampaikan laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2021. Acara ini dilakukan secara fisik dan virtual dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan dimulai pada pukul 09.00 WIB.

Presiden Joko Widodo hadir secara virtual dari Istana Negara Jakarta. Jokowi didampingi oleh sejumlah menteri yakni Menkopolhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly.

Di hadapan Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin menyampaikan mengenai capaian perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung selama tahun 2021.

Menurut Syarifuddin, beban perkara pada Mahkamah Agung pada tahun 2021 adalah sebanyak 19.408 perkara.

“Terdiri dari perkara masuk sebanyak 19.209 perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun lalu sebanyak 199 perkara. Dari jumlah beban perkara tersebut, Mahkamah Agung selama tahun 2021 berhasil memutus sebanyak 19.233 perkara,” kata Syarifuddin, Selasa, 22 Februari 2022.

Syarifuddin mengatakan, setelah 19.233 perkara telah diselesaikan maka sisa perkara tahun 2022 ini adalah sebanyak 175 perkara. Menurutnya, jumlah sisa perkara tersebut merupakan rekor terendah yang pernah dicapai dalam sejarah Mahkamah Agung.

“Berdasarkan data penyelesaian perkara tersebut, maka rasio produktivitas memutus Mahkamah Agung tahun 2021 adalah sebesar 99,10 persen

atau lebih tinggi dari indikator kinerja utama yang ditetapkan yaitu sebesar 70 persen,” ujarnya.

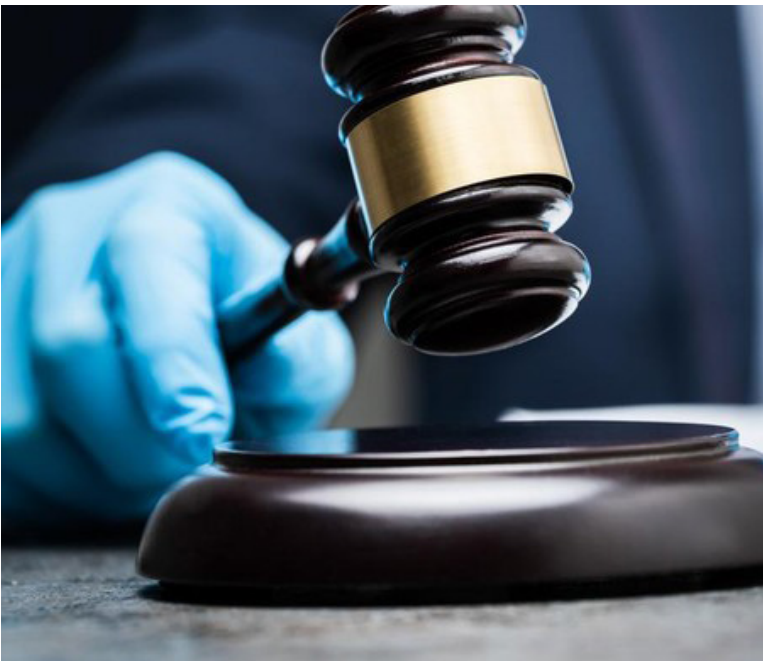
Syarifuddin juga mengungkapkan, selama tahun 2021, jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung berkurang sebesar 6,50 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Sehingga beban penanganan perkara juga berkurang sebesar 6,52 persen, hal tersebut mengakibatkan jumlah perkara yang diputus juga menjadi berkurang sebesar 6,46 persen.

“Rasio produktivitas memutus perkara mengalami peningkatan sebesar 0,06 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020. Berkurangnya jumlah perkara masuk tahun 2021 tersebut dipengaruhi oleh penurunan jumlah permohonan peninjauan kembali perkara pajak sebesar 33,53 persen,” kata Syarifuddin.

Selanjutnya, Syafruddin juga menyampaikan jumlah pidana denda dan uang pengganti berdasarkan putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap pada perkara pelanggaran lalu lintas, tindak pidana korupsi, narkoba, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dan perkara-perkara pidana lainnya.

“Jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan putusan Mahkamah Agung adalah sebesar Rp21.995.131.485.546,20. Sedangkan jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama yang berkekuatan hukum tetap di lingkungan peradilan umum dan Peradilan Militer adalah sebesar Rp 51.905.031.913.135,” ujarnya.

Jokowi: Pemerintah Transformasi Hukum Demi Berantas Korupsi



Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mengklaim pemerintah melakukan transformasi di bidang hukum. Dia menyebut salah satu tujuan transformasi tersebut adalah memberantas tindak pidana korupsi.

Jokowi menyampaikan transformasi di bidang hukum dilakukan dengan penyederhanaan birokrasi dan aturan. Dia berkata upaya itu akan menimbulkan berbagai dampak positif.

Jokowi menyampaikan pemerintah juga sedang melakukan transformasi di beberapa sektor lain. Misalnya, di sektor pembangunan dengan pemerataan pembangunan yang Indonesia-sentris.

Kata Jokowi pada Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2021, Selasa (22/2).

Kemudian, pemerintah mentransformasi bidang ekonomi. Jokowi bilang pemerintah sedang menggenjot hilirisasi industri, digitalisasi UMKM, dan peralihan ke energi terbarukan.

Mantan Wali Kota Solo itu percaya berbagai transformasi yang dilakukan bertujuan menyejahterakan rakyat Indonesia. Namun, ia menyampaikan upaya itu tak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Pemerintah butuh dukungan penuh dari seluruh komponen bangsa, pemerintah butuh dukungan penuh dari lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Pemerintah butuh dukungan dari Mahkamah Agung,” ujarnya.

Jokowi meyakini MA punya peran penting mendukung transformasi ini. Dia bilang MA punya peran dalam mengeluarkan keputusan penting atau landmark decision.

“Dengan menghasilkan landmark decision yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, ... serta memberikan efek jera bagi koruptor dan mafia-mafia hukum yang mencederai rasa keadilan,” tutur Jokowi.



**KINERJA
PENANGANAN PERKARA**
Januari-April 2022



Kepaniteraan MA Gelar Simulasi TTE Salinan Penetapan Penahanan dan Petikan Putusan serta Aplikasi Direktori Putusan Versi **Mobile**

Jakarta (03/06/2022) – Dalam rangka mewujudkan manajemen perkara yang modern, Kepaniteraan Mahkamah terus berimprovisasi. Salah satu wujud nyata dari improvisasi tersebut adalah terselenggaranya kegiatan Presentasi dan Simulasi Tanda Tangan Elektronik Dokumen Petikan Putusan dan Penetapan Penahanan serta Aplikasi Mobile Launcher Direktori Putusan (03/06/2022). Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Panitera MA tersebut dibuka langsung oleh Panitera MA, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Panitera Muda Perkara, Koordinator Data dan Informasi, Hakim Yustisial pada Kepaniteraan, Kabag pada Sekretariat Kepaniteraan, Kabag Pemeliharaan Sistem Informasi, Kabag Pengembangan Sistem Informatika, Tim Pusat Data dan Informasi, perwakilan AIPJ 2, dan Tim Asistensi Pembaruan MA.

Berlangsungnya Acara

Koordinator Data dan Informasi, Asep Nursobah, yang bertindak sebagai pemandu kegiatan, memulai kegiatan ini tepat pukul 09.30 WIB. Setelah pemandu acara menyampaikan pengantar kegiatan, acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan kegiatan oleh Panitera MA.

Dalam sambutannya, Panitera MA menyatakan bahwa tujuan utama dari pembangunan Sistem e-Sign dan Aplikasi Mobile Launcher Direktori Putusan ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan dan pemberian akses informasi kepada masyarakat pencari keadilan.

“Kegiatan yang sedang kita laksanakan ini merupakan ikhtiar Mahkamah Agung untuk mewujudkan sistem peradilan yang modern.



Tujuan akhirnya adalah untuk memberikan layanan hukum terbaik pada pencari keadilan serta mewujudkan kemudahan akses informasi”, tegas Panitera MA.

Lebih lanjut, Panitera MA juga mengingatkan bahwa modernisasi manajemen perkara harus terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Hal ini dikarenakan jumlah perkara yang diterima dan diputus Mahkamah Agung juga terus meningkat. Peningkatan jumlah perkara tersebut meniscayakan kebutuhan dukungan sistem yang baik, agar penanganan perkaranya berjalan lancar dan optimal.

“Jumlah perkara yang diterima MA periode Januari-April 2022 meningkat 41,59%, jumlah perkara yang diputus periode Januari-April 2022 juga meningkat 32,71 %. Eskalasi ini tentu harus diimbangi manajemen penyelesaian perkara yang modern”, imbuhnya.

Setelah sambutan Panitera MA, acara dilanjutkan dengan presentasi dan simulasi Sistem e-Sign dan Aplikasi Mobile Launcher Direktori Putusan. Narasumber dalam termin ini adalah Direktur PT Bahtera Informatika, selaku pihak yang ditunjuk untuk mengerjakan program pengembangan sistem tersebut.

Usai pemaparan yang cukup komprehensif, agenda kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Para peserta kegiatan sangat antusias dalam berdiskusi. Banyak pertanyaan berbobot yang diajukan kepada narasumber. Selain pertanyaan, juga banyak informasi-informasi penting lain yang disampaikan oleh para peserta diskusi yang juga merupakan stakeholder dalam bidang penyelesaian perkara.

Pokok-Pokok Presentasi dan Simulasi

Direktur PT Bahtera Informatika membagi presentasinya menjadi tiga bagian utama: Jadwal, e-Sign, dan Mobile Apps Direktori Putusan.

Pertama, jadwal. Direktur PT Bahtera Informatika menyampaikan bahwa sebenarnya kegiatan presentasi dan simulasi ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan panjang yang telah dan akan diselenggarakan dalam rangka pembangunan Sistem e-Sign dan Aplikasi Mobile Launcher Direktori Putusan. Rangkaian panjang kegiatan

telah dimulai dengan kegiatan penyampaian progress e-sign dan mobile launcher (25 Mei 2022), kemudian dilanjutkan dengan kegiatan presentasi dan simulasi hari ini, nantinya juga akan dilanjutkan dengan penyusunan module training (27 Juni 2022), training e-sign (8 Juli 2022), launching e-sign (15 Juli 2020), dan final report (minggu ke-2 Agustus 2022).

Kedua, e-Sign

Pada bagian ini Direktur PT Bahtera Informatika mempresentasikan secara mendetil mengenai latar belakang e-sign, target output e-sign, bisnis proses e-sign, e-sign-arsitektur, proses e-sign, dan e-sign pada Aplikasi Upaya Hukum.

Ketiga, Mobile Apps Direktori Putusan

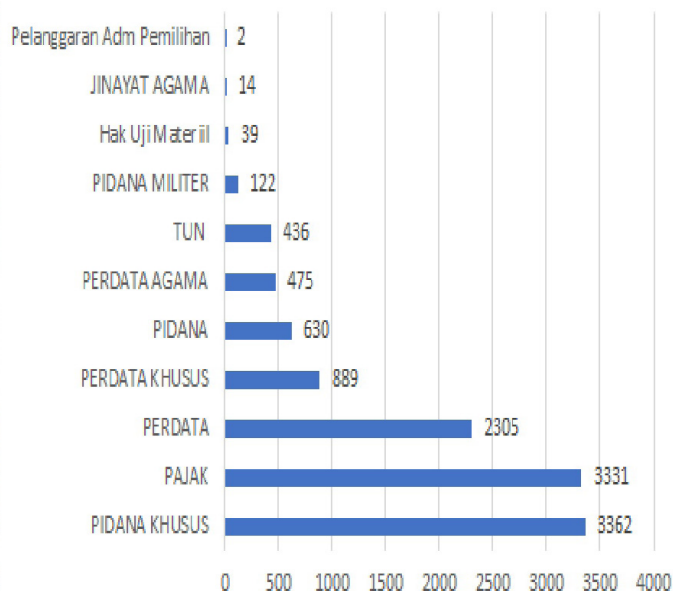
Presentasi mengenai Mobile Apps Direktori Putusan meliputi media komunikasi data, proses validasi dan upload, dan juga fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi. Tidak sekedar presentasi menggunakan media PPT, narasumber juga menayangkan video simulasi Sistem e-Sign dan Aplikasi Mobile Launcher Direktori Putusan.

Agenda Mendatang

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pembangunan Sistem e-Sign dan Aplikasi Mobile Launcher Direktori Putusan adalah kegiatan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pada waktu mendatang, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah menuntaskan agenda-agenda yang telah disusun sebelumnya, mulai dari penyusunan modul, peluncuran e-sign, hingga final report.

Selain itu, dalam agenda diskusi kegiatan hari ini, terdapat usulan-usulan yang perlu ditindaklanjuti demi penyempurnaan Sistem e-Sign. Usulan tersebut antara lain: 1) perlu diatur mekanisme perbaikan petikan putusan yang telah terlanjur ditandatangani secara elektronik dan dikirim ke pengadilan pengaju, 2) perlunya pengembangan sistem yang memungkinkan pengiriman petikan putusan terhadap lembaga terkait (misal: Lapas), 3) perlunya pengembangan template petikan putusan, dan 4) sosialisasi kepada pengadilan pengaju terkait implementasi e-sign. (aza/mrg)

Perkara yang Diterima MA Periode Januari-April 2022 Meningkat 41,59%



JAKARTA | (30/05) - Selama periode Januari sampai dengan April 2022, Mahkamah Agung telah meregistrasi sebanyak 11.605 perkara. Jumlah ini meningkat 41,59% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang hanya meregister sebanyak 8.196 perkara. Sementara itu, jumlah perkara yang telah diputus pada periode tersebut sebanyak 7.193 perkara. Jumlah ini meningkat 32,71% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang berjumlah 5.420 perkara.

Demikian disampaikan oleh Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H., dalam laporan periodik yang diakses Senin (30/5/2022). Menurut Panitera

MA, beban penanganan perkara yakni kumulasi sisa perkara tahun sebelumnya dengan jumlah perkara yang diregister pada tahun berjalan, juga mengalami peningkatan. Jumlah beban perkara pada catur wulan pertama di tahun 2022 ini sebanyak 11.780 perkara. Jumlah ini merupakan gabungan dari sisa perkara tahun 2021 berjumlah 175 perkara dan perkara yang diregister sebanyak 11.608 perkara.

“Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022, jumlah beban perkara catur wulan pertama tahun 2022 meningkat 40,32%”, ujar Ridwan Mansyur.

Perkara Pidsus Mondominasi

Dikatakan Panitera MA, dari 11.605 perkara yang diterima MA pada periode Januari s.d April 2022, perkara pidana khusus merupakan jumlah perkara terbanyak yang mencapai 28,97%. Urutan perkara berikutnya secara berturut-turut adalah sebagai berikut: perkara pajak (28,70%), perkara perdata (19,86%), perkara perdata khusus (7,66%), perkara pidana (5,43%), perkara perdata agama (4,09%), perkara TUN (3,76%), perkara pidana militer (1,05%), perkara HUM (0,34%), perkara jinayat (0,12%) dan perkara pelanggaran administrasi pemilihan (0,02%).

“Jenis perkara pidana khusus, mendominasi perkara yang diajukan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali ke MA”, jelas Panitera MA.

Tabel Keadaan Perakara

Untuk memperekas keadaan perkara pada periode Januari --April 2022, berikut kami sajikan tabel keadaan perkara

JENIS PERKARA	SISA	MASUK	BEBAN	PUTUS	SISA	% Memutus
PERDATA	16	2305	2321	1308	1013	56,36%
PERDATA KHUSUS	11	889	900	770	130	85,56%
PIDANA	10	630	640	444	196	69,38%
PIDANA KHUSUS	124	3362	3486	1720	1766	49,34%
PERDATA AGAMA	7	475	482	388	94	80,50%
JINAYAT AGAMA	0	14	14	12	2	85,71%
PIDANA MILITER	0	122	122	87	35	71,31%
TUN	7	436	443	355	88	80,14%
PAJAK	0	3331	3331	2081	1250	62,47%
Hak Uji Materiil	0	39	39	28	11	71,79%
Pelanggaran Adm Pemilihan	0	2	2	0	2	0,00%

Keadaan perkara pada setiap kamar perkara adalah sebagai berikut:

JENIS PERKARA	SISA	MASUK	BEBAN	PUTUS	SISA	% Memutus
PERDATA	27	3194	3221	2078	1143	64,51%
PIDANA	134	3992	4126	2164	1962	52,45%
AGAMA	7	489	496	400	96	80,65%
MILITER	0	122	122	87	35	71,31%
TUN	7	3808	3815	2464	1351	64,59%

(an/tim pralan)

Jumlah Perkara yang Diputus MA Periode Januari-April 2022 Meningkat 32,71%

JAKARTA | (31/05/2022) - Sebagaimana diberitakan Laman Kepaniteraan, Senin (30/5/2022), Panitera MA, Ridwan Mansyur, mengungkapkan jumlah perkara yang diputus pada periode catur wulan pertama tahun 2022 meningkat 41,59%. Lalu bagaimana dengan kinerja memutus perkara pada periode tersebut? Merujuk pada sumber yang sama, jumlah perkara yang diputus Mahkamah Agung pada periode Januari --April 2022 juga mengalami peningkatan cukup signifikan. Secara year on year, peningkatan jumlah perkara yang diputus mencapai 32,71 %.

Menurut Ridwan Mansyur, sebanyak 7.193 perkara telah diputus selama periode Januari--April 2022, sedangkan pada periode yang sama pada tahun 2021 jumlah perkara yang diputus sebanyak 5420 perkara.

“Dengan demikian ada kenaikan 32,71 %”, ujar Panitera MA.

Rasio produktifitas memutus (case deciding productivity rate) yang menjadi salah satu indikator pengukuran kinerja, pada periode tersebut sebesar 61,06 %. Jumlah tersebut masih 8,94% di bawah target yang ditetapkan (70%)

Namun demikian, rasio produktivitas pada periode awal tahun yang masih di bawah 70% adalah hal yang wajar

bahkan logis. Hal ini karena jangka waktu memutus perkara adalah paling lama 3 bulan sejak perkara diterima majelis, sehingga perkara yang diregister bulan Januari baru akan diputus pada sekitar bulan Maret sedangkan perkara yang diregister bulan Februari baru akan diputus sekitar bulan April.

“ Pada tiga bulan pertama, majelis hakim belum banyak memutus perkara baru. Fokus majelis adalah memutus sisa perkara tahun sebelumnya” Ungkap ridwan mansyur.

Apa itu rasio produktifitas memutus

Rasio produktivitas memutus perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara dengan beban perkara pada periode tertentu. Rasio produktivitas memutus perkara yang tinggi (di atas 70%) menjadi indikator pengadilan berkinerja tinggi. Sebaliknya, rendahnya rasio produktivitas memutus menjadi pertanda pengadilan berkinerja rendah. Pada kondisi ini pengadilan dibebani tumpukan tunggakan perkara (case backlog).

Rasio produktivitas memutus Mahkamah Agung dalam dasa warsa terakhir selalu di atas 90 %. Berdasarkan Laporan Tahunan MA, tahun 2021 mencatatkan rekor kinerja terbaik dengan nilai rasio produktivitas MA mencapai 99,10 % [an]



Panitera MA : Kinerja Minutasi Perkara MA Periode Januari—April 2022 Meningkatkan 27,89%



JAKARTA | (20/5/2022) Selama periode Januari—April 2022, Kepaniteraan Mahkamah Agung mengirimkan berkas perkara/salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 8.740 perkara. Jumlah tersebut meningkat 27,89% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 (year on year) yang mengirim sebanyak 6.834 berkas perkara.



Demikian disampaikan Panitera MA, Ridwan Mansyur, di ruang kerjanya, Jum'at (20/05/2022). Menurut Panitera MA, peningkatan kinerja minutasi bukan hanya dari sisi jumlah berkas yang dikirim namun juga waktu penyelesaian. Mengutip data pada SIAP-MA, Panitera MA menjelaskan bahwa dari 8.740 berkas perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju pada catur wulan pertama tahun 2022, sebanyak 3.359 (38,43%) diselesaikan dalam waktu kurang dari 120 hari kalender terhitung mulai perkara diterima oleh majelis sampai dikirim ke pengadilan pengaju.



Peningkatan kinerja minutasi bukan hanya dari sisi jumlah berkas yang dikirim namun juga waktu penyelesaian.

Pengikisan Tunggakan Minutasi

Sementara itu terkait dengan pengikisan jumlah tunggakan minutasi perkara, Panitera MA mengungkapkan bahwa pada akhir tahun 2021, MA memiliki tunggakan minutasi sebanyak 9.363 perkara. Jumlah tunggakan tersebut telah terkikis 64,24% pada akhir April 2024 sehingga tersisa 3.348 perkara. Panitera MA berkomitmen untuk



kepaniteraan.mari_info

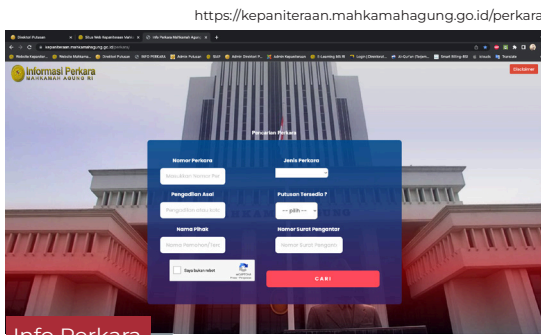


@kepaniteraan



Newsletter

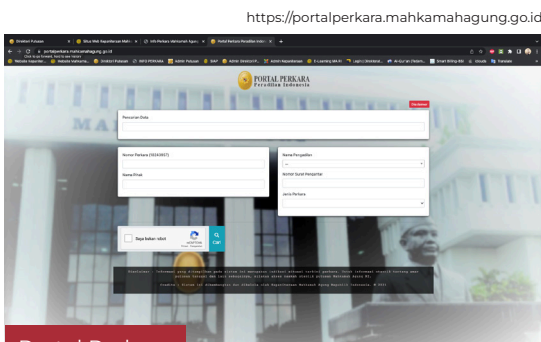
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id> kepaniteraan.mari@gmail.com [kepaniteraan_mari_info](https://www.instagram.com/kepaniteraan_mari_info)



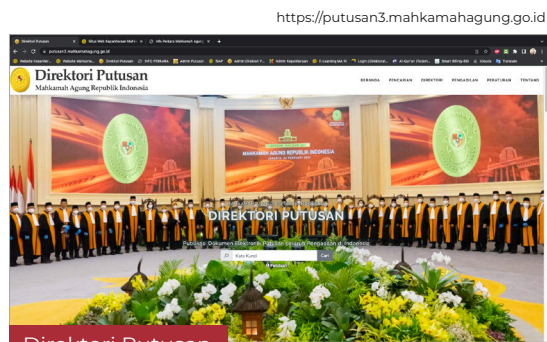
Info Perkara



Website Kepaniteraan



Portal Perkara



Direktori Putusan